

**POLITIK PERDAGANGAN INDONESIA DALAM KONTEKS
IMPLEMENTASI ASEAN CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA)
TAHUN 2015-2020**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

MUHAMAD RIDHO PANGESTU

19323143

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

**POLITIK PERDAGANGAN INDONESIA DALAM KONTEKS
IMPLEMENTASI ASEAN CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA)
TAHUN 2015-2020
SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

MUHAMAD RIDHO PANGESTU

19323143

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

**POLITIK PERDAGANGAN INDONESIA DALAM KONTEKS
IMPLEMENTASI ASEAN CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA)
TAHUN 2015-2020**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia



Ketua Program Studi

Karina
Karina Utami Dewi, S.I.P.M.A.

Dewan Penguji

1. Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A.
2. Hadza Min Fadhli Robby, S.IP., M.Sc.
3. Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.

Tanda Tangan

Hangga Fathana
Hadza Min Fadhli Robby
Hasbi Aswar

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 25 Agustus 2023



Muhamad Ridho Pangestu

HALAMAN PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbil'alamin atas semua nikmat yang telah engkau berikan kepadakuya Rabbiku sehingga hamba mampu menyelesaikan skripsi ini dengan sebagaimana mestinya.

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk orang-orang yang sangat aku cintai seumur hidupku serta yang selalu menjadi motivasi besarku untuk menjadi orangsukses dan bermaanfaat bagi orang banyak :

“IBUKU TERCINTA”
IBU SURYARINI

Tidak ada lagi kata yang bisa aku ucapkan selain ucapan terima kasih yang tiada taraatas segala doa, semangat, motivasi, nasehat, dan seluruh perjuangan yang telah diberikan selama ini. Siapa diriku tanpa engkau Ibu tetesan air mata yang menemaniku dalam menuliskan kata persembahan ini mengingat betapa besar kasihsayang yang diberikan kepadaku, yang aku pun tidak tahu apakah aku bisa membalasnya.

HALAMAN MOTTO

Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Yang takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua

Buya Hamka

Learn From Yesterday

Live For Today

And

Hope For Tomorrow

Albert Einstein

*KULIAH ITU SULIT TAPI PERCAYALAH LEBIH SULIT ORANG
TUA BUAT NGULIAHIN KITA*

Mahasiswa Rantau

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan nikmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Politik Perdagangan Indonesia Dalam Konteks Implementasi ASEAN CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA) Tahun 2015-2020” sebagai tugas akhir dalam perkuliahan dan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Prodi Hubungan Internasional di Universitas Islam Indonesia. Banyak hambatan maupun rintangan dalam proses penulisan dan pengerjaan skripsi tersebut, namun dukungan dan motivasi dari berbagai pihak yang mampu memberikan semangat serta membantusaya dalam melalui hambatan yang berdatangan. Terima kasih dan syukur saya ucapkan kepada berbagai pihak, diantaranya:

1. Ibu Dr.Phill. Qurotul Uyun, S.Psi., M.Si., Psikolog, selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
2. KarinaUtami Dewi S.IP.,M.A. , sebagai Ketua Kaprodi Hubungan Internasional sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi dan Dosen Pembimbing Akademik saya. Saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya sudah menjadi dosen sekaligus Bapak selama di perkuliahan. Tanpa bimbingan, motivasi serta nasihatnya tidak mungkin saya bisa menyelesaikan skripsi tersebut.
3. Ibu Suryarini selaku ibunda tercinta saya. Saya haturkan banyak terima kasih atas semua doa yang tiada henti memberikan semangat, perhatian, dan kasih sayang yang diberikan sebagai bumbu utamabagi saya dalam menyelesaikan skripsi.

4. Dosen Pembimbing Skripsi saya yaitu Bapak Hangga Fathana S.IP., B.Int.St., M.A.
5. Ibu Gustrieni Putri S.IP., M.A., selaku dosen pembimbing akademik saya yang telah banyak membantu proses perkuliahan saya.
6. Para Ibu dan Bapak Dosen HI UII, Hasbi Aswar S.IP., M.A., Ph.D. Geradi Yudhistira S.Sos., M.A., Enggar Furi Hardianto S.IP., M.A., serta seluruh dosen yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas ilmu yang diberikan selama menuntut ilmu di Prodi Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
7. Mardiatul Khasanah (Mbak Diah) sebagai Asisten Prodi Hubungan Internasional serta teman-teman asisten Prodi Hubungan Internasional yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terima kasih karena sudah selalu memberikan informasi terkait jadwal perkuliahan serta menjadi wadah penampungan pertanyaan dan curahan hati kami semua.
8. Rekan-Rekan saya dari WAK WAK REBORN karena telah menjadi teman saya dalam suka dan duka selama berkuliah di HI UII.
9. Wanita yang saya sayangi Alfiatus Zahra karena telah membantu serta membuat saya mengerti banyak perihal kehidupan dan perancangan masa depan saya.
10. Sahabat serta teman-teman seperjuangan di perkuliahan saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

11. Teman kontrakan saya dari Karangjenjem, B4, Garuda 81 karena telah menjadi teman hidup yang memotivasi saya dalam keseharian saya.

Serta semua pihak dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang telah berperan serta mewujudkan skripsi ini. Terakhir, dengan segala kerendahan hati saya selaku penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan.

Muhamad Ridho Pangestu

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Cakupan penelitian.....	6
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.6 Kerangka Pemikiran.....	10
1.7 Argumen Sementara.....	14
1.8 Metode Penelitian.....	14
1.8.1 Jenis Penelitian.....	14
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	15
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	15
1.8.4 Proses Penelitian	15
1.9 Sistematika Pembahasan	16
BAB II	17
KONTEKS PENINGKATAN KERJA SAMA EKONOMI	17
LUAR NEGERI INDONESIA & TIONGKOK 2015-2020	17
2.1. Kebijakan Ekonomi Luar Negeri Indonesia.....	17
2.2 Hubungan Bilateral Indonesia – Tiongkok: Perdagangan.....	19
2.3 Hubungan Bilateral Indonesia – Tiongkok: Investasi.....	23
BAB III	30
ANALISIS FAKTOR REGIONALISME TERHADAP PENGAMBILAN KEBIJAKAN INDONESIA TERHADAP TIONGKOK DALAM LINGKUP ACFTA	30
3.1 Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Kepercayaan	32
3.2 Regionalisme Sebagai Hadiah Bagi Mitra Perdagangan.....	35
3.3 Kerja Sama Ekonomi Regional dan Agenda Keamanan Baru	36
3.4 Regionalisme sebagai Alat Tawar-Menawar	39
3.5 Regionalisme Sebagai Mekanisme Penguncian Reformasi	40

3.6 Regionalisme Untuk Memenuhi Tuntutan Timbal Balik.....	42
3.7 Kemudahan Negosiasi dan Implementasi Perjanjian ACFTA.....	43
BAB IV	45
PENUTUP.....	45
4.1 Kesimpulan	45
Kerja Sama Ekonomi Regional dan Agenda Keamanan Baru.....	46
4.2 Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	49

DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR

Gambar

Gambar 1. Neraca Perdagangan Indonesia terhadap Tiongkok, 2015-2021.....	23
Gambar 2. Sistem Afiliasi Proyek KCIC	27

Tabel

Tabel 1. Proyek Infrastruktur di Indonesia yang didanai oleh AIIB	19
Tabel 2. Nilai Ekspor Indonesia terhadap Tiongkok (2015-2020).....	34
Tabel 3. Kesimpulan Analisis Variabel.....	46

DAFTAR SINGKATAN

ACFTA	: ASEAN <i>China Free Trade Area</i>
AFTA	: ASEAN <i>Free Trade Area</i>
AIIB	: ASIAN <i>Infrastructure Investment Bank</i>
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APEC	: <i>Asia-Pacific Economic Cooperation</i>
BASARNAS	: Badan SAR Nasional
BRI	: <i>Belt Road Initiative</i>
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CAEXPO	: <i>China ASEAN Expo</i>
COVID	: <i>Corona Virus Disease</i>
FTA	: <i>Free Trade Area</i>
IPTEK	: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
KCIC	: Kereta Cepat Indonesia-Cina
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
LCS	: Laut Cina Selatan
LoI	: <i>Letter of Intent</i>
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
OBOR	: <i>One Belt One Road</i>
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
RCEP	: <i>Regional Comprehensive Economic Partnership</i>
USD	: <i>United States Dollar</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>
ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif

ABSTRAK

Hubungan kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok dalam sektor ekonomi khususnya dalam skema ACFTA sudah berjalan cukup lama, melalui hal tersebut kedua negara bisa dikatakan sebagai sebuah mitra dagang aktif namun dilema yang terjadi adalah kondisi Indonesia yang mengalami defisit neraca perdagangan dengan Tiongkok, dengan kondisi tersebut pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo Indonesia malah melakukan peningkatan kerja sama dengan Tiongkok. Hal tersebut namun dapat ditanggguhkan dengan Teori John Ravenhill yang menjelaskan faktor regionalisme sebagai tolak ukur pengambilan kebijakan ekonomi khususnya untuk strategi politik sebuah negara dalam menerapkan sebuah kebijakan ekonomi. Skema ACFTA menjadi salah satu jembatan bagi kedua negara baik dalam hal kebijakan, perdagangan, dan investasi, peningkatan yang terjadi merupakan bentuk strategi Indonesia dalam menyikapi perkembangan zaman khususnya pada sektor pertumbuhan negara dan mengambil dampak kemudahan akses berkat regionalisme antara Indonesia dan Tiongkok.

Kata Kunci: ACFTA, Ekonomi, Kerja Sama, Indonesia, Regionalisme, Tiongkok

ABSTRACT

The cooperative relationship between Indonesia and China in the economic field, especially in the ACFTA scheme, has been going on for quite a long time, through this the two countries can be said to be active trading partners but the dilemma that arises is that Indonesia is experiencing a trade balance deficit with China, under these conditions during the President's administration Joko Widodo, Indonesia even increased cooperation with China. However, this can be protected by John Ravenhill's theory which explains the regional factor as a benchmark for economic policy making, especially for a country's political strategy in implementing an economic policy. The ACFTA scheme is a bridge for the two countries both in terms of policy, trade and investment, the increase that has occurred is a form of Indonesia's strategy in responding to the times, especially in the country's growth sector and taking the impact of ease of access thanks to regionalism between Indonesia and China.

Key Words: ACFTA, China, Economic, Indonesia, Relationship, Regionalism

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dengan sumber daya alam yang melimpah, sehingga bisa dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi cukup kuat akan sebuah pergerakan ekonomi secara global, hal ini menjadi identitas utama Indonesia di kancah internasional sebagai negara yang kaya akan segala bentuk sumber daya alam. Melalui hal tersebut Indonesia juga tidak ketinggalan untuk memperkaya pendapatan negara melalui bidang ekonomi.

Perdagangan internasional merupakan salah satu cara Indonesia untuk dapat mendongkrak *surplus* negara serta masih banyak keuntungan dari beberapa hal lain yang akan didapatkan. Pasar perdagangan internasional disini menjadi instrumen dalam Indonesia menjalankan aktivitas dagangnya dan harus dikatakan bahwa di dalam sistem perdagangan internasional juga tercakup hal yang berkaitan dengan politik. Politik dalam perdagangan internasional memiliki fungsi untuk mengatur tentang sistem dan regulasi setiap negara pelaku perdagangan luar negeri sehingga bisa dikatakan bahwa setiap pergerakan perdagangan pasti akan melibatkan politik di dalamnya dan hal tersebut merupakan dinamika yang terjadi selama ini (Salvatore 2014).

Indonesia dalam menjalani proses perdagangan internasional terbagi atas beberapa kegiatan perdagangan dan pastinya ada bentuk kerja sama antar negara antara lain kerja sama Bilateral, Multilateral, dan Regional. Melalui hal tersebut juga Indonesia juga terlibat beberapa fasilitator dan pelindung bagi segala bentuk kebijakan dalam menjalankan perdagangan internasional salah satunya yaitu ASEAN China Free Trade Area (ACFTA) bentuk perjanjian ini mencakup seluruh negara di ASEAN salah satunya Indonesia dengan Tiongkok untuk dapat

memudahkan segala bentuk regulasi dalam menjalankan kegiatan perdagangan. ACFTA juga dapat dikatakan sebagai sebuah instrumen yang mewadahi aktivitas perdagangan Tiongkok dengan negara ASEAN tidak terkecuali Indonesia, ACFTA merupakan bentuk kerja sama bilateral yang dibuat dengan tujuan agar seluruh sistem perdagangan yang terjadi akan lebih terstruktur sehingga akan memudahkan antar pelaku kegiatan mendapat tujuannya masing-masing tanpa ada kendala. Tiongkok dan Indonesia merupakan kedua negara yang sudah cukup lama menjalin bentuk kerja sama khususnya di bidang ekonomi.

Aktivitas kedua negara ini dalam menjalankan perdagangan sudah berlangsung cukup lama dan dapat dikatakan bahwa kedua negara ini sudah berada di tahap saling berkaitan dan sama-sama memiliki visi dan misi yang sejalan sehingga terbentuknya ACFTA menjadi sebuah bentuk implementasi dan kontribusi kedua negara ini untuk tetap menjaga stabilitas perekonomian khususnya dalam atap perjanjian ACFTA. Perjanjian ACFTA ini memiliki tujuan untuk mengurangi hambatan-hambatan yang terjadi dalam perdagangan barang, meningkatkan akses layanan untuk produk tarif maupun non-tarif, mengendalikan kebijakan serta ketentuan non tarif, sehingga dapat meningkatkan kerja sama ekonomi antara negara ASEAN dengan Tiongkok (Sari & Suhadak, 2017). Data statistik perdagangan (IMF 2012) menunjukkan bahwa Indonesia dan Tiongkok memiliki hubungan perdagangan yang erat, serta Tiongkok menjadi mitra dagang utama Indonesia setelah ASEAN. Kesepakatan perjanjian ACFTA dapat meningkatkan volume perdagangan pada sektor impor dan ekspor antara Indonesia dan Tiongkok. Total nilai perdagangan Indonesia dengan Tiongkok yaitu US\$ 36,2 miliar (2010) dan jumlah tersebut merupakan 12,4% dari total perdagangan Indonesia (Setiawan 2014). Pada periode 2006-2010, perdagangan antara kedua

negara tersebut mendapatkan pertumbuhan positif sebesar 30%. Namun seiring berjalannya waktu, Indonesia fokus melakukan ekspor pada produk seperti pertambangan, minyak dan gas (sumber daya alam) sedangkan Tiongkok mengekspor produk manufaktur seperti elektronik, mesin dan transportasi dengan harga murah, hal tersebut membuat neraca perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok menjadi asimetris. Selisih harga yang cukup jauh mengenai produk impor Tiongkok dan barang buatan dalam negeri akan membuat konsumen lebih memilih produk impor Tiongkok di bandingkan dengan produk lokal. Hal tersebut menyebabkan banyak sekali produsen lokal yang kalah bersaing dan membuat neraca perdagangan Indonesia tidak seimbang (Candra *et al.* 2021).

Sejak bergabung dengan ACFTA pada awal dekade 2000, Indonesia tidak pernah mengalami *surplus* perdagangan dengan Tiongkok. Kegiatan ekspor dan impor antara Tiongkok dan Indonesia juga memiliki kesenjangan yang semakin tinggi tiap tahunnya dikarenakan produk Tiongkok lebih dapat memenuhi kebutuhan konsumen Indonesia dengan harga yang kompetitif tetapi memiliki kualitas yang lebih baik. Kesenjangan yang tinggi antara ekspor dan impor merupakan tanda yang harus di khawatirkan. Jika ditinjau kembali mengenai tujuan dibentuknya ACFTA seharusnya memberikan dampak positif untuk perkembangan perdagangan internasional antara Indonesia dengan Tiongkok, namun yang terjadi adalah perkembangan ekspor ke Tiongkok yang bernilai negatif dan terdapat pertumbuhan positif pada impor non-migas dari Tiongkok ke Indonesia. Kinerja ekspor Indonesia ke Tiongkok mengalami penurunan, namun pada tahun 2017 mengalami kenaikan. Hal tersebut dapat terjadi karena terdapatnya krisis ekonomi global, perlambatan ekonomi Tiongkok, menurunnya harga komoditi utama ekspor Indonesia dan adanya larangan ekspor bahan mineral

mentah. Pada tahun 2020, akibat adanya wabah COVID-19 di Tiongkok, jumlah produk impor dari negara tersebut menurun menjadi \$39,63 miliar atau 11,8% (Candra *et al.* 2021). Karena terjadi penurunan impor dari Tiongkok, Indonesia melakukan persempitan kesenjangan defisit perdagangan dengan Tiongkok. Namun, keuntungan ini harus ditanggung oleh industri maupun orang yang terkena dampak pandemi. Hal tersebut didasari pada kepentingan politik Indonesia terutama pada awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo di mana Indonesia mulai berfokus kepada peningkatan ekonomi domestik dengan menarik Tiongkok dalam pembangunan ekonomi Indonesia melalui perdagangan, hal tersebut dapat dilihat dari awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang menghasilkan beberapa kemitraan dan perjanjian strategis yang dilakukan pada peningkatan kerja sama ekonomi di tahun 2015 antara lain:

- a. MoU Kerja Sama Ekonomi antara Menko Perekonomian RI dengan Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi Tiongkok.
- b. MoU Kerja Sama Pembangunan Industri dan Infrastruktur antara Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi Tiongkok dengan Menteri BUMN.
- c. MoU antara Menteri BUMN dengan Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi Tiongkok untuk pembangunan kereta cepat Jakarta – Bandung.
- d. MoU antara Badan SAR Nasional (BASARNAS) RI dengan Menteri Transportasi Tiongkok.
- e. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Indonesia dan Tiongkok untuk pencegahan pajak berganda.

Sejalan dengan hal tersebut maka kebijakan luar negeri Presiden Joko Widodo menyepakati kerja sama bilateral dengan tujuan agar Indonesia dan Tiongkok bisa mewujudkan gagasan poros maritim dunia dan inisiatif jalan sutera

maritim abad 21, kerja sama ini disepakati guna mewujudkan konektivitas maritim di Kawasan melalui pembangunan infrastruktur serta beberapa investasi khususnya bagi Indonesia dengan mega proyek KCIC (Kereta Cepat Indonesia Tiongkok) juga merupakan bentuk dari implementasi beberapa perjanjian pasca kepemimpinan Presiden Joko Widodo khususnya di rentang waktu 2015-2020. Dengan hal tersebut maka Indonesia dan Tiongkok merupakan kedua negara yang sangat berkegantungan dan saling membutuhkan dalam memajukan ekonomi negara masing-masing sehingga kepentingan politik Indonesia akan semakin kompleks karena banyak terikat dengan beberapa bentuk kebijakan dan perjanjian yang memungkinkan Indonesia yang secara neraca perdagangan mengalami defisit secara menerus akan menggunakan cadangan devisa yang secara logika malah akan membuat negara semakin merugi, namun harus digaris bawahi bahwa setiap defisit tersebut Indonesia memiliki strategi politik yang akan menguntungkan di sektor lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Indonesia mengambil manfaat dari faktor regionalisme dalam kondisi defisit neraca perdagangan terhadap Tiongkok dalam skema ACFTA?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kepentingan politik kerja sama Indonesia pada tahun 2015-2020 dengan tetap meningkatkan kerja sama ekonomi dalam kondisi Indonesia defisit neraca perdagangan.

2. Untuk mendeskripsikan kerja sama dan kebijakan pemerintah Indonesia-Tiongkok dalam menjalankan proses perdagangan luar negeri pada tahun 2015-2020.
3. Untuk mengetahui kebijakan dan kerja sama yang disepakati Indonesia-Tiongkok selama tahun 2015-2020 dalam menjalani proses perdagangan luar negeri.
4. Untuk mengetahui manfaat dari faktor regionalisme terhadap proses kerja sama Indonesia dan Tiongkok.

1.4 Cakupan penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memiliki fokus dimulai dari keputusan peningkatan kerja sama pemerintah Indonesia dengan Tiongkok selama tahun 2015-2020. Penulis memiliki alasan dalam mengambil penelitian pada tahun tersebut karena pemerintah Indonesia memutuskan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dengan Tiongkok melalui kesepakatan perluasan jangkauan BRI (*Belt Road Initiative*). Kerja sama kedua negara ini pada dasarnya telah berlangsung lebih dari dua dekade melalui perantara ACFTA, namun pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melakukan peningkatan kerja sama ekonomi selama tahun 2015-2020, meskipun realita yang terjadi Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan, Batasan waktu tersebut diambil bertujuan untuk melihat kebijakan pemerintahan Joko Widodo terhadap pengambilan keputusan peningkatan kerja sama Indonesia-Tiongkok dalam bidang perdagangan luar negeri khususnya dalam instrumen perdagangan dan investasi.

1.5 Tinjauan Pustaka

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno, Sutrisno pernah mengadakan penelitian mengenai masalah dan strategi mengatasi defisit neraca perdagangan Indonesia. Dalam penelitiannya, Sutrisno mengungkapkan bahwa dilemma dalam menghilangkan defisit neraca perdagangan merupakan dinamika yang telah menjadi hal yang lumrah dalam ekonomi global. Defisit neraca perdagangan bisa disiasati dengan menyatukan kebijakan moneter dan fiskal. Dengan kata lain bahwa Indonesia berusaha mencari pasar lain di luar negara yang menjadi pasar utama Indonesia dalam kondisi defisit yang disini bisa dikatakan nilai impor yang masih lebih tinggi dari nilai ekspor dan Indonesia dapat mencari pasar lain guna mendongkrak nilai ekspor dengan menjual beberapa komoditi dengan harga yang lebih baik sehingga diharapkan akan tercipta keseimbangan nilai perdagangan walaupun dengan pihak atau negara yang berbeda (Sutrisno 2019).

Menurut penelitian yang dilakukan Elvierayani *et al.* mengenai uji beda ekspor dan import Indonesia-China sebelum dan sesudah pandemic covid-19 bahwa dalam penelitiannya menjelaskan mengenai dinamika atas aktivitas ekspor impor antara Indonesia dan Tiongkok yang merupakan kegiatan yang berlangsung cukup aktif dalam realita pelaksanaannya di lapangan, namun dapat dikatakan aktivitas ini sering mendapatkan halangan oleh beberapa faktor yang mengikatnya seperti faktor alam, manusia, dan beberapa faktor lainnya. Untuk bentuk artikel yang pertama adalah berkaitan dengan kondisi kegiatan ekspor dan impor antara Indonesia dan juga Tiongkok ketika dilanda pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 hingga saat ini tentu saja didapati kendala di dalamnya terlebih dalam hal virus Covid sendiri Tiongkok menjadi pusat perhatian dikarenakan penyebaran virus ini diawali oleh Negara tersebut dan menjadikan posisi Tiongkok

bisa dikatakan sangat tidak stabil. Adanya pandemi ini menyebabkan perekonomian dari Tiongkok maupun Indonesia mengalami masa sulit di mana banyak pelaku usaha terutama usaha kecil yang mengalami kebangkrutan, melalui hal tersebut maka dapat dikatakan proses dagang antara kedua negara ini sempat mengalami penurunan namun tidak dengan *demand* antara kedua Negara ini sama sekali tidak menunjukkan *trend* penurunan sama sekali, kendala yang lumayan berpengaruh adalah efek dari bangkrutnya usaha-usaha kecil menyebabkan opsi dalam pemilihan barang antar Negara menjadi sedikit akan opsi yang ada (Elvierayani *et al.* 2021).

Menurut Elms dan Minh mengenai chapter 9: understanding Asean integration and trade menjelaskan bahwa ASEAN memiliki tujuan dalam melakukan ekspansi besar terhadap sebuah perjanjian yang pada hal ini adalah ACFTA, selain memiliki ambisi kuat dalam melakukan ekspansi ASEAN juga bertekad menciptakan hubungan yang baik dan harmonis khususnya untuk memajukan integritas regional, ASEAN dengan ambisi dalam percepatankemajuan dinilai sangat strategis dalam pelaksanaan ACFTA dengan melihat manfaat dari sektor ekonomi dan non ekonomi yang bisa didapatkan khususnya dari mitra mereka yaitu Tiongkok (Elms dan Minh 2019).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Salvatore, Salvatore pernah mengadakan penelitian mengenai ekonomi internasional. Salvatore mengungkapkan bahwa faktor keberagaman tarif juga dapat dikatakan sebagai kendala atau sistematika yang memang berada di dalam lingkup perdagangan internasional, tarif atau cukai dapat dikatakan mengikat aktivitas ekspor impor yang meliputi pergerakan suatu komoditas baik datang dan pergi melalui garis teritorial, melalui tarif juga merupakan sumber penerimaan sebuah negara dalam

kegiatan perdagangan, sebagai contoh harga ekspor suatu komoditas dijual dengan harga lebih mahal dibanding penjualan di lingkup domestik, hal tersebut merupakan cukai yang mengikat barang tersebut akibat proses perdagangan yang melewati wilayah teritorial (Salvatore 2014).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nurcahyo dan Aditya mengenai dampak penerapan bea masuk anti-dumping atas impor produk tinplate, Nurcahyo dan Aditya mengatakan bahwa anti dumping yang dilaksanakan oleh Indonesia sejak tahun 1996 nyatanya belum menemui titik terang dikarenakan Indonesia masih belum menjalankan sepenuhnya anti dumping yang menyebabkan nilai kegiatan ekspor impor Indonesia mengalami defisit pada tahun 2018 yaitu sebesar 8 juta USD menurut data BPS, hal tersebut merupakan bukti tidak efektifnya terhadap kegiatan anti dumping yang menyebabkan kesenjangan antar komoditi barang yang berimbas kepada besaran tarif pada produk tertentu (Nurcahyo & Aditya 2020).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Setiawan mengenai Asean-China FTA: dampaknya terhadap ekspor Indonesia dan China, Setiawan mengemukakan bahwa terkait keberlangsungan aktivitas ekspor impor Indonesia dan China juga terkandung bermacam bentuk perjanjian di dalamnya, baik itu regional, multilateral dan bilateral. Melalui hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa bentuk kerja sama antara kedua negara ini sudah terbilang sangat kuat, dibalik suksesnya aktivitas ini maka ada satu perjanjian yang menjadi tolak ukur dalam menjalani aktivitas ini ialah perjanjian *Asean China Free Trade Area (ACFTA)* di mana perjanjian ini merupakan bentuk perjanjian yang telah berjalan cukup lama. Oleh karena itu dengan berjalannya perjanjian ini juga ada hal yang dinamakan dumping di mana proses penambahan harga suatu komoditi, dalam rentang waktu 2012-2016

dapat dikatakan bahwa proses dagang yang terjadi antara Indonesia dan Tiongkok senantiasa mengalami *surplus* namun masih terkesan kurang seimbang dikarenakan nilai ekspor Tiongkok masih lebih tinggi daripada Indonesia yang menyebabkan ketidakseimbangan tarif dalam menjalankan dumping dikarenakan hal tersebut (Setiawan 2012).

1.6 Kerangka Pemikiran

Penulis mencoba untuk mengutip teori atau pendapat para ahli yang memiliki hubungan dengan objek yang diteliti dan disimpulkan pada kerangka pemikiran di mana tindakan ini dimaksudkan untuk memberi pondasi teoritis yang pada akhirnya akan dapat membantu dalam memformulasikan hipotesis, di mana hal ini dianggap penting karena teori-teori tersebut digunakan untuk dapat mendalami fenomena-fenomena yang terjadi seperti pada hal ini di mana Indonesia menjalani politik perdagangan luar negeri dengan Tiongkok yang mengalami defisit pada rentang tahun 2015-2020.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, untuk mencari tahu kepentingan politik Indonesia dalam menjalankan politik perdagangan luar negerinya yaitu dengan Tiongkok, dalam kata lain di mana instrumen pendukungnya ialah perjanjian ASEAN China Free Trade Area (ACFTA) digunakanlah model teori John Ravenhill yang menjelaskan tentang dilema dalam perdagangan antar negara dan Ekonomi Politik Global secara menyeluruh, John Ravenhill dalam tulisannya menjelaskan tentang dilema perdagangan negara di kawasan Asia Timur yang kondisinya persis dengan Indonesia dan Tiongkok di mana kedua negara ini bisa dikatakan saling berkegantungan satu sama lain.

John Ravenhill mengklasifikasikan beberapa alasan kuat yang menjadi tolak ukur penulis dalam menggunakan model teori John Ravenhill terutama hal yang berkaitan dengan tetap bertahannya aktivitas perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok, disini penulis menggunakan alasan Perjanjian Perdagangan Regional yang menjadi tujuh poin utama dalam menjawab rumusan masalah terkait kepentingan politik Indonesia kepada Tiongkok.

Pertama adalah kerja sama ekonomi dan pembangunan kepercayaan di mana hal ini dapat dikatakan sebagai kecenderungan sebuah negara untuk dapat mempertahankan eksistensi negara melalui politik perdagangan luar negeri dengan menjalankan aktivitas perdagangan secara aktif dan terus menerus sehingga dapat terhindar dari ketidakpastian ekonomi di mana ketika berkaca kepada alasan utama Indonesia memiliki satu pasar aktif yang saling berkegantungan dengan Tiongkok. Melalui hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dengan alasan pembentukan sebuah kerja sama, sebuah negara dapat memastikan pasarnya melalui keterikatan kerja sama ekonomi sehingga timbul rasa percaya bagi pelaku perdagangan, ketika hal tersebut berjalan sebagai kegiatan yang aktif secara terus menerus sehingga negara tidak akan kehilangan pasar aktif dalam menjalankan kegiatan perdagangan luar negeri.

Kedua, regionalisme sebagai tolak ukur sebuah negara dalam menjalankan bentuk kerja sama perdagangan dengan memberikan rasa aman sebagai mitra dagang aktif, dapat dikatakan faktor regionalisme sebagai bentuk apresiasi mitra dagang regional sebagai instrumen yang tidak bisa lepas dari semua kegiatan negara yang menjalankan proses kerja sama ekonomi, melalui hal tersebut maka bentuk kerja sama perdagangan dalam sebuah skema perjanjian dagang dapat dikatakan sebagai sebuah alasan kuat bagi para pelaku perdagangan khususnya

lingkup regional untuk dapat memperoleh hadiah khususnya dari mitra dagangnya. Melalui hal tersebut faktor regionalisme sebagai hadiah mitra perdagangan menjadi sebuah faktor di mana mitra dagang mendapat perlakuan khusus atau mendapat prioritas akibat aktifnya suatu bentuk perdagangan khususnya dalam lingkup regional.

Ketiga ialah faktor kerja sama regional yang akan membuka agenda perdagangan yang baru, disini kembali kepada sisi strategis ketika kerja sama dinilai telah efektif maka akan tercipta sebuah agenda atau perjanjian baru kedepannya sehingga faktor ini tentu melihat sebuah proyeksi yang akan terjadi untuk kelanjutan proses perdagangan kedepannya, tentu dengan memperhatikan kondisi yang sedang terjadi untuk dijadikan sebuah kemanfaatan di masa depan.

Keempat ialah faktor regionalisme sebagai alat tawar menawar menjadi acuan bahwa kondisi regional dapat dijadikan landasan dalam kemudahan tawar menawar khususnya dalam bidang ekonomi dan penawaran bentuk kerja sama lainnya dengan kata lain pembuktian akibat terus berjalannya kegiatan perdagangan bisa dijadikan bahan untuk melakukan proses tawar menawar bentuk kerja sama akibat bukti proses dagang yang telah terjadi selama ini serta pada faktor ini mengacu kepada tawar menawar sebelum sebuah bentuk kerja sama terjadi, sehingga faktor ini akan secara langsung memberikan akses berlebih terhadap rencana atau proyeksi sebuah negara dalam menjalankan proses kerja sama ekonomi.

Kelima adalah regionalisme sebagai mekanisme untuk penguncian reformasi yang selaras dengan bentuk kerja sama kedua negara yang telah terikat cukup lama menyebabkan rasa percaya satu sama lain bahkan untuk pihak luar sekaligus seperti WTO yang lebih menyukai bentuk kerja sama regional yang baik

dibanding kerja sama multilateral karena pada dasarnya perdagangan kedua negara merupakan bentuk pasar aktif yang terjalin cukup lama, melalui hal itu reformasi yang timbul dari kedua negara sudah dapat dipastikan selaras untuk perencanaan masa mendatang.

Keenam adalah faktor regionalisme sebagai elemen untuk mendapat timbal balik, faktor ini menjadi nilai lebih dalam menjalankan hubungan kerja sama kedua negara karena memasuki bentuk kerja sama yang telah terikat maka kedua negara akan menghasilkan bentuk kerja sama timbal balik, di mana sama-sama mengisi permintaan yang sekiranya disetujui bersama, oleh karena itu faktor ini dipercaya merupakan manfaat yang didapatkan sebagai mitra dagang aktif sehingga akan timbul sebuah kemudahan negosiasi khususnya pasca sebuah kerja sama tercipta.

Ketujuh ialah kemudahan negosiasi dan implementasi perjanjian, faktor ini berkaitan dengan posisi sebuah negara karena sudah mendapatkan akses secara khusus melalui beberapa penandatanganan MoU misalnya pelaku perdagangan dari Kawasan ASEAN tidak memerlukan akses dari ACFTA yang notabene menaungi negara ASEAN jadi pada dasarnya ketika akses perdagangan hanya dilakukan oleh dua belah pihak maka akan lebih mudah dalam memantau atau bahkan mengambil sebuah kebijakan, semisal dua pihak tidak mendapat apa yang diinginkan yang di mana Indonesia dan Tiongkok proses negosiasi akan lebih mudah dilakukan tanpa campur tangan pihak lainnya.

Melalui tujuh poin di atas penulis menerapkan model teori John Ravenhill sebagai sebuah teori perdagangan luar negeri yang bisa dikatakan kompleks menjadi memiliki sebab dan akibat yang bisa ditelaah secara saksama, John Ravenhill pada bukunya yang berjudul *Global Political Economy*, disisi lain juga mengacu kepada terus berjalannya kegiatan perdagangan kawasan Asia walaupun

banyak terkendala oleh beberapa aspek sehingga harus dilihat dari urgensi ketujuh poin di atas untuk dapat menguatkan penelitian penulis.

1.7 Argumen Sementara

Berdasarkan model teori John Ravenhill maka penulis beranalisis bahwa Indonesia tetap melanjutkan kegiatan perdagangannya dengan Tiongkok walaupun dalam kondisi defisit neraca perdagangan merupakan sebuah hal yang lumrah dalam dinamika kerja sama ekonomi, khususnya dalam hal ini faktor regionalisme menjadi acuan bagi Indonesia yang malah melakukan peningkatan kerja sama pada rentang 2015-2020. Penulis beranalisis bahwa Indonesia sebagai subjek yang *power* ekonominya tidak sebaik Tiongkok memiliki sebuah strategi kebijakan yang mengarah kepada keuntungan pada sektor non ekonomi serta disisi lain Indonesia tentu menjadikan ajang kerja sama ini sebagai bentuk validasi negara agar semakin dikenal sebagai negara yang memiliki sistem dalam bekerja sama yang baik untuk eksistensi Indonesia kedepannya.

1.8 Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan analisis penelitian kualitatif dandeskriptif yaitu studi yang berfokus kepada subjek/objek yang diteliti. Studi pustaka yang digunakan ialah studi yang berkaitan dengan peningkatan bentuk kerja sama Indonesia dan Tiongkok dalam kerangka ACFTA, serta antara negara ASEAN dengan Tiongkok yang tergabung dalam perjanjian ACFTA.

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis Kualitatif karena penulis mengambil sumber dari bahan literatur.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah negara Indonesia sebagai pelaku perdagangan internasional yang sudah terikat akan sebuah kebijakan ekonomi yang dinamakan ACFTA, serta untuk objek nya sendiri adalah aktivitas perdagangan luar negeri dan investasi Indonesia dengan Tiongkok.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam tulisan ini menggunakan literatur secara tidak langsung seperti, jurnal, buku, e-book, situs resmi, surat kabar dan media massa, serta beberapa laporan resmi dari badan pemerintahan atau instansi terkait yang membahas terkait perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Tiongkok.

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam proses pengumpulan data guna memenuhi seluruh klasifikasi penelitian, disesuaikan dengan kemampuan saya sebagai penulis serta berusaha mencari sumber literatur terpercaya dan terkini guna mendapatkan data yang akurat.

1.9 Sistematika Pembahasan

Bab I - Kerangka pada Bab I membahas poin-poin mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian.

Bab II - Pada Bab II membahas mengenai konteks pembahasan kebijakan perdagangan Indonesia kepada Tiongkok serta menjelaskan konteks Perdagangan dan Investasi.

Bab III - Pada Bab III menjelaskan dan memaparkan hasil yang sudah diteliti dan dibahas dari Bab II serta mengaitkan Kerangka Pemikiran terhadap masalah yang diteliti.

Bab IV - Pada Bab IV ini difokuskan kepada hasil kesimpulan dari masing-masing Bab serta rekomendasi.

BAB II

KONTEKS PENINGKATAN KERJA SAMA EKONOMI LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP TIONGKOK 2015-2020

2.1. Kebijakan Ekonomi Luar Negeri Indonesia

Indonesia memiliki karakteristik kebijakan ekonomi yang bersifat *low profile* dalam menjalankan sistem kebijakan ekonominya, dalam hal ini *low profile* bermakna bahwa Indonesia dalam menjalankan ekonominya menerapkan sistem keterbukaan yang menyampaikan segala bentuk masalah dan kebutuhan untuk konteks kemajuan ekonomi dalam negeri, dalam konteks ini kecenderungan politik tersebut mengalami peningkatan pasca transformasi kepemimpinan di era Presiden Joko Widodo di mana dalam peningkatan bentuk kebijakan perdagangan luar negeri mengalami kenaikan dalam bentuk kerjanya dengan Tiongkok dengan beberapa kerja sama yang disepakati di awal kepemimpinan Presiden Jokowi (Situmorang 2014). Dalam menjalankan ekonominya Indonesia tentu melihat peluang yang akan didapat sehingga bentuk peningkatan serta penetapan kebijakan yang dilancarkan akan tepat pada sasaran sehingga dapat memantapkan posisi Indonesia dalam mengambil kebijakan ekonomi, dalam konteks ini Presiden Jokowi mengedepankan kebijakan poros maritim dunia dalam menjangkau pasar internasional secara menyeluruh, sehingga bersamaan dengan diselenggarakannya KTT APEC yang dilaksanakan di Tiongkok pada Tahun 2015 hal tersebut menjadi bentuk kebijakan revolusioner Jokowi di awal kepemimpinannya, melalui hal tersebut Jokowi juga mengedepankan beberapa poin penting dalam pengambilan kebijakan tersebut antara lain, investasi, produksi, fluktuasi angka ekspor & impor, menciptakan pasar baru (Panjaitan 2015).

Melalui tujuan tersebut maka kebijakan Indonesia yang ditetapkan masih menysasar kepada sektor pertumbuhan negara sehingga kebijakan yang diambil juga masih terus bisa diperbaharui mengikuti perkembangan tiga faktor di atas. Kebijakan Indonesia disini mengacu kepada kemajuan ekonomi Indonesia disisi lain kedua negara ini yang sudah hampir satu dekade lebih terikat dengan bentuk kerja sama ACFTA. ACFTA dibentuk berlandaskan atas permintaan pasar ASEAN atas perwujudan perdagangan yang bebas dari hambatan-hambatan perdagangan

baik dalam konteks tarif dan non-tarif, ACFTA juga diharapkan akan meningkatkan pasar dari dan menuju Tiongkok dengan negara di kawasan ASEAN. Hal tersebut pun sudah dapat dikatakan bahwa kebijakan yang selama ini dilancarkan oleh Indonesia juga berjalan pada porosnya seperti penetapan daerah

ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) yang sering menuai pro dan kontra dengan Tiongkok karena dalam hal tersebut menyangkut kepada keberlangsungan sumber daya alam kedua negara yang pada dasarnya akan diolah bahkan diperjual belikan sehingga Indonesia disini dengan penerapan politik ekonomi *low profile* akan tetap independen dalam hal penetapan garis teritorial karena dampak yang ditimbulkan akan berdampak kepada hubungan kedua negara tersebut (Andika & Aisyah 2017).

Mengacu kepada percepatan Indonesia yang dirancang oleh rezim Jokowi maka kebijakan Indonesia berfokus kepada aspek nilai ekspor dan impor khususnya untuk sektor produksi untuk peningkatan nilai ekspor sehingga fokus tersebut bisa dikatakan kebijakan yang menysasar kepada sektor perdagangan, untuk fokus rezim Jokowi berikutnya juga membuka jalan bagi pihak manapun sehingga elemen investasi juga masuk kedalam fokus kebijakan Indonesia khususnya pada kepemimpinan Jokowi. Hal tersebut menjadi alasan kuat bahwa

kebijakan ekonomi Indonesia memang berfokus kepada Perdagangan dan Investasi.

2.2 Hubungan Bilateral Indonesia – Tiongkok: Perdagangan

Perdagangan merupakan instrumen penting dalam hubungan kerja sama antara dua negara atau lebih, serta hal tersebut juga menjadi alasan utama negara-negara dalam menjalin kerja sama yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Melalui perdagangan maka bisa ditelaah bahwa perdagangan menjadi faktor penting dalam mengikat negara yang sedang melakukan kerja sama, perdagangan juga menjadi sebuah tolak ukur sebuah negara dalam menjalankan sistem ekonomi untuk pengolahan serta alokasi dana ekonomi bagi negara pelaku perdagangan. Kesepakatan perdagangan bebas kawasan atau yang biasa disebut dengan AFTA (ASEAN Free Trade Area) merupakan salah satu cara untuk mempertegas penerapan perdagangan bebas. Pada kawasan ASEAN, AFTA kemudian menjadi salah satu bentuk kerja sama yang memiliki tujuan untuk terbentuknya kawasan perdagangan bebas dengan program komprehensif untuk mereduksi tarif regional (Siwi, 2013). Melalui penerapan perdagangan bebas, ASEAN mengalami perkembangan dari waktu ke waktu dan hal tersebut tentunya berimbas kepada Indonesia. Pada awalnya penerapan perdagangan ini hanya pada kawasan ASEAN saja, tetapi hal tersebut berkembang dan penerapan perdagangan diperluas ke beberapa negara di luar kawasan ASEAN, seperti kawasan Asia Timur salah satunya yaitu Tiongkok dan Tiongkok menjadi sorotan utama ASEAN dalam penerapan kerja sama ini. Melalui *free trade* nya, kemudian ASEAN membentuk kesepakatan baru pada tanggal 4 November 2002 yang berbentuk ACFTA (ASEAN – China Free Trade Area).

Dominasi aktivitas perdagangan kedua negara memang lebih dominan dilancarkan oleh Indonesia karena posisi Indonesia yang masih berkembang secara pertumbuhan ekonomi dibanding Tiongkok, hal tersebut juga menjadi realita yang terjadi khususnya di sektor perdagangan di mana Indonesia senantiasa mencari celah dalam meningkatkan ekonomi perdagangannya dengan Tiongkok, dengan menggunakan cara di atas di mana lebih banyak mengedepankan peran aktor dalam memajukan perdagangan. maka ketiga hal tersebut juga merupakan dinamika kedua negara dalam menjalani perdagangan. Pada bidang perdagangan, kegiatan ekspor dan *untapped market* harus lebih ditingkatkan oleh Kementrian Luar Negeri dan para pejabat diplomat harus lebih aktif dalam mempromosikan keunggulan kompetitif Indonesia secara ekonomi. Selain mempromosikan, para pejabat diplomat juga harus terjun langsung ke lapang untuk menjual produk dalam negeri dan mencari peluang di bidang lain sehingga kegiatan ekspor dapat ditingkatkan, menarik investasi untuk masuk dan dapat memahami karakter pasar (Mardhiyyah & Dadan 2023).

Pada tahun 2015 antara Indonesia dan Tiongkok meningkatkan bentuk kerja sama khususnya di bidang perdagangan, hal tersebut terbukti pada awal kuartal tersebut kedua negara menyepakati MoU terkait pembangunan infrastruktur, peningkatan pengawasan pajak berganda, serta bentuk sektor lain seperti peningkatan di bidang mineral, gas, logistik, industri untuk meningkatkan perdagangan antar kedua negara ini. Pada tahun 2015 juga Indonesia menghadiri pameran ekonomi Tiongkok yang dinamakan forum bisnis Indonesia-Tiongkok untuk menyepakati MoU yang telah disepakati kedua negara. Indonesia juga serius pada penyelenggaraan CAEXPO (China ASEAN Expo) ke-12 di tahun 2015 dan kegiatan tersebut telah dihadiri sebanyak 12-kali sehingga bersamaan dengan

strategi promosi perdagangan yang dilaksanakan maka Indonesia juga menghadirkan beberapa perusahaan ternama seperti, PT RAPP, PT Liany, PT Cahaya Mas Global Kopi, dan masih banyak perusahaan lainnya (BAPPEDA 2015).

Indonesia melalui pameran CAEXPO di tahun 2015 mendapat keuntungan atas hasil penjualan sebesar \$3 Juta USD dari beberapa produk yang dipasarkan dan ditahun selanjutnya Indonesia mendapat keuntungan yang sama secara angka laba bersih (Falah 2016). Pada pameran tersebut mencakup banyak sekali bidang seperti pendidikan, budaya, pariwisata, lingkungan, pertanian, teknologi dan *e-commerce*. Nilai transaksi Indonesia di pameran CAEXPO mengalami peningkatan di tahun 2018 dan meraih nilai transaksi dagang retail sebesar \$5.8 juta USD. Dengan meraih nilai tersebut, Indonesia memiliki potensi menarik pasar untuk membeli produk Indonesia di luar pameran. Salah satu produk yang memiliki daya Tarik yang tinggi adalah produk tas anyaman rotan yang diproduksi oleh CV Prima Lestari dengan permintaan sebanyak 2000 tas untuk kemasan kosmetik. Hal tersebut membuat nilai transaksi meningkat 190% dari tahun-tahun sebelumnya (Mardhiyyah & Dadan 2023).

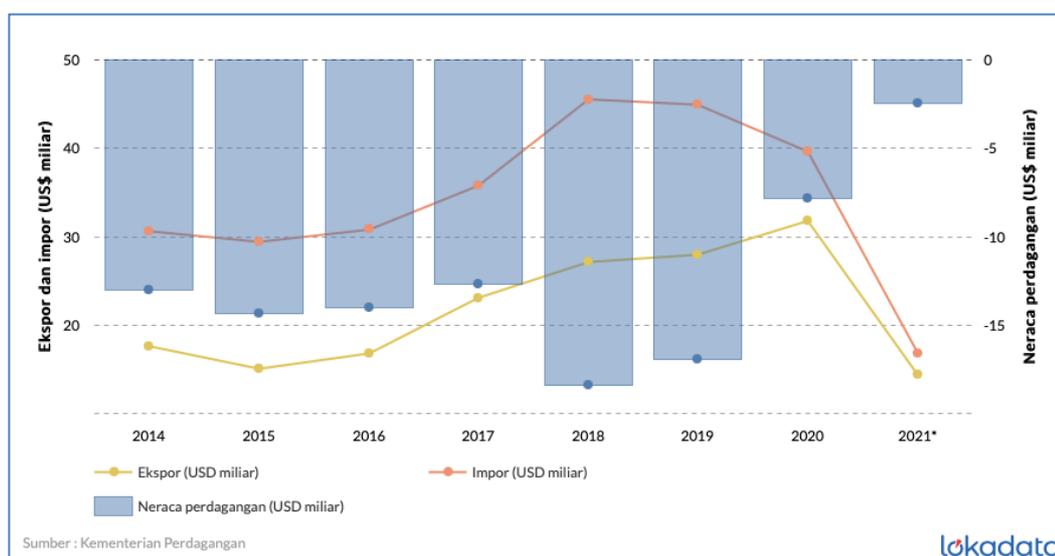
Pada tahun 2019, Indonesia kembali mendapatkan peluang besar di pameran CAEXPO. Di tahun ini, Indonesia mendapatkan julukan *Charms of Honor* yang di mana Indonesia mendapatkan booth dengan posisi pertama dan menjadi pusat perhatian dalam berlangsungnya pameran. Momentum tersebut tentunya memberikan kesempatan yang besar bagi Indonesia. Saat berlangsungnya pameran ini, tentunya para delegasi Indonesia mengawal jalannya peningkatan hubungan kerja sama antara Indonesia dengan Tiongkok. Di tengah rangkaian CAEXPO, terdapat beberapa kesepakatan antara lain: a) penandatanganan *Joint Venture*

Agreement PT Daya Barus dengan *State Power Investment Corporation* (SPIC) untuk kerja sama pembangunan hydroelectric di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, b) penandatanganan MoU PT TAN Indo Sukses dengan Fuzhou Tremendous International Trading Co Ltd untuk PE Recycle Pallet and Film Products. Tentunya dari kerja sama perdagangan tersebut memperoleh banyak manfaat bagi negara-negara yang terlibat khususnya Indonesia dan Tiongkok.

Dalam melakukan kerja sama diperlukan adanya kerangka perjanjian yang berisikan tentang regulasi untuk mengatur jalannya kerja sama. *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) merupakan kesepakatan perdagangan bebas terbesar di dunia atau yang biasa disebut dengan mega *Free Trade Agreement* (FTA) yang dideklarasikan oleh Indonesia pada tahun 2011 saat Indonesia menjadi ketua ASEAN. Pembentukan kesepakatan tersebut memiliki tujuan untuk memperkuat hubungan perdagangan dan investasi di kawasan mega blok perdagangan yang dapat berpengaruh terhadap perekonomian dunia (Mardhiyyah & Dadan 2023).

Selain hal yang berkaitan dengan hubungan peningkatan perdagangan selama rentang 2015-2020 perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok, proses perdagangan yang terjadi antara kedua negara ini nyatanya telah berlangsung lebih dari puluhan tahun namun fakta menarik yang dapat dijumpai adalah diawali pasca perluasan BRI Indonesia mengalami peningkatan nilai neraca perdagangan baik nilai impor dan ekspor itu sendiri, hal ini bisa dikatakan berkesinambungan dengan gencarnya Indonesia mencari pasar di pameran CAEXPO, dampak positif dari keuntungan yang didapatkan dari nilai ekspor memang nyata didapatkan namun berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag RI) neraca perdagangan Indonesia mengalami minus di \$10

Juta USD jika dirata ratakan dari tahun 2015-2020 dan mengalami defisit tertinggi di tahun 2018 di angka \$18,4 Juta USD. Meski dalam rentang tahun tersebut, Indonesia mengalami kenaikan nilai ekspor, namun harus disadari bahwa nilai impor juga semakin meningkat. Defisit selalu terjadi di tahun 2015-2020 dikarenakan tidak adanya keseimbangan perdagangan yang dilakukan Indonesia. Hal tersebut sebenarnya bukan tidak lain dikarenakan kecenderungan produk Tiongkok yang lebih mendominasi secara kualitas menjadikan nilai ekspor Indonesia tidak bisa mengalami *surplus* dikarenakan kebutuhan masyarakat yang masih tinggi terhadap barang impor Tiongkok.



Gambar 1. Neraca Perdagangan Indonesia terhadap Tiongkok, 2015-2021.

2.3 Hubungan Bilateral Indonesia – Tiongkok: Investasi

Investasi merupakan instrumen penting dalam hubungan kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok, hal terkait investasi bisa dikatakan sebagai instrumen yang akan menimbulkan akibat baik itu positif atau negatif dikemudian hari dikarenakan investasi bersifat sesuatu yang tidak bisa diprediksi namun bisa dikontrol atau dikategorikan sesuai kebutuhan pelaku kerja sama antara dua belah pihak, Indonesia dan Tiongkok pada praktik investasinya juga sama dengan sektor

perdagangan yaitu mengalami percepatan pertumbuhan investasi antara kedua negara yang tentunya investasi ketika berjalan sesuai target juga akan memenuhi kebutuhan perdagangan secara tidak langsung karena dampak yang ditimbulkan dari investasi bisa berupa bentuk dukungan materil dan lain-lain sehingga investasi memegang peranan penting dalam mengolah arah kerja sama kedua negara ini dalam menjalani hubungan bilateral. Salah satu kegiatan yang dapat membantu investasi antara Indonesia-Tiongkok adalah kegiatan ekspor. Ekspor itu sendiri merupakan salah satu sumber pendapatan Indonesia karena hal tersebut memiliki dampak pada pemasukan devisa negara, serta membantu untuk mencegah defisit neraca perdagangan. Kegiatan ekspor juga dapat memperbesar pasar untuk membangun investasi dalam negeri (Rana 2007).

Pada bidang investasi, Pemerintah Indonesia membuat kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang bertujuan untuk memudahkan kegiatan usaha dengan meningkatkan keseimbangan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah, penyederhanaan prosedur perizinan dan mudahnya proses bisnis. Serta adanya kebijakan dalam cepatnya pembangunan infrastruktur, perbaikan iklim investasi dan reformasi structural dapat menjadi hal positif dalam mendorong pertumbuhan kegiatan investasi. Di awal tahun 2015-2016, kerja sama Indonesia-Tiongkok khususnya di perdagangan dan investasi mengalami beberapa hambatan. Tiongkok mengatakan bahwa hambatan dalam berinvestasi kepada Indonesia adalah birokrasi yang cukup rumit dalam penerbitan sertifikat AMDAL dan izin pembukaan lahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah belum siap dan merealisasikan dengan baik komitmen yang telah dibuat, serta terdapat kendala fasilitas infrastruktur yang buruk, sehingga akan menyebabkan tingginya biaya apabila melakukan investasi terhadap Indonesia.

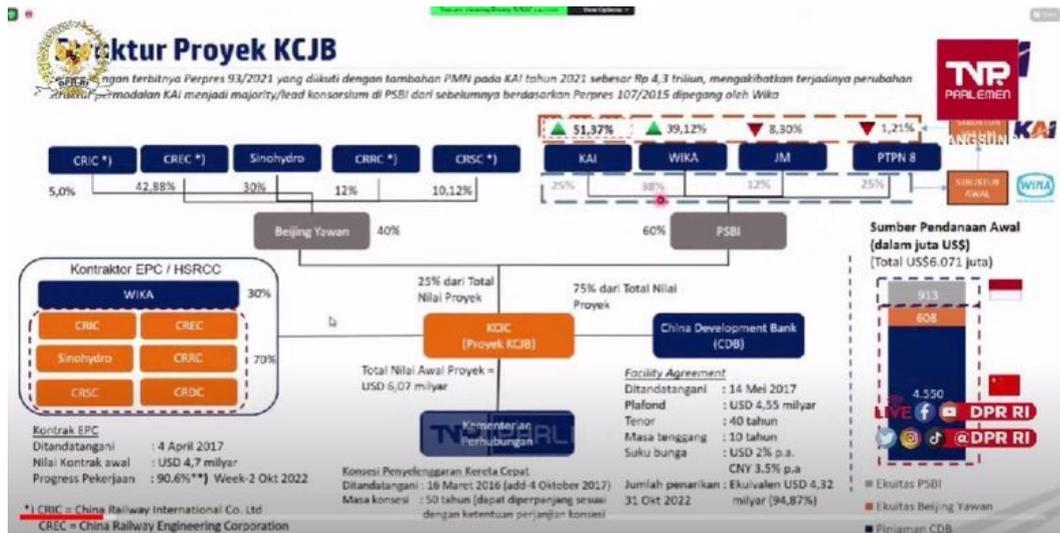
Hal lain yang disampaikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok yaitu Soegeng Rahardjo pada tahun 2016 bahwa terhambatnya investasi yang masuk ke Indonesia adalah kurangnya informasi dari kedua belah pihak. Indonesia belum sepenuhnya mengetahui mengenai informasi-informasi tentang dampak positif dari perkembangan Tiongkok terhadap masyarakat dan kawasan. Sementara informasi yang belum diketahui jelas oleh Tiongkok adalah mengenai bahwa sebagian besar masyarakat hanya mengetahui Indonesia sebagai negara kepulauan, bukan sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan G-20. Hambatan-hambatan seperti itu membuat pemerintah jadi memperhatikan akan kegiatan investasi dan memperbaiki infrastruktur karena hal tersebut merupakan faktor utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2016.

Kenaikan dalam kegiatan perdagangan Indonesia-Tiongkok pada tahun 2018 membuat kegiatan investasi juga ikut meningkat. Pada tahun 2018 terdapat kesepakatan kerja sama investasi antara Pacific Construction Group dan PT Farmino International Teknologi senilai \$5 miliar USD yang ditandai dengan penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) (Mardhiyyah & Dadan 2023). Indonesia seperti yang telah diketahui memiliki kebijakan terkait perluasan jangkauan ekonomi menyeluruh yang berfokus kepada sektor investasi, produksi, fluktuasi angka ekspor & impor, menciptakan pasar baru (Panjaitan 2015). Hal tersebut menjadi acuan Indonesia dalam meraih investor baru demi kemajuan sektor di atas, lalu yang menjadi tolak ukur bentuk investasi yang terjadi ialah dapat berdampak kepada visi dari pembentukan kebijakan yang sudah dirumuskan sebelumnya, investasi yang dilancarkan kedua negara ini lebih condong kepada Indonesia sebagai negara penerima dan Tiongkok sebagai negara penyokong dikarenakan memang secara Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Tiongkok lebih

diunggulkan ditambah dengan kebutuhan Indonesia melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi.

Rentang tahun 2015-2020 investasi yang terkenal revolusioner yaitu mega proyek yang dinamakan Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) di mana proyek ini merupakan gagasan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan infrastruktur berkelanjutan agar dapat mempermudah koneksi antar kota, proyek ini pada awal dilayangkan kepada investor sudah ada dua pihak yang ingin menempati posisi sebagai investor pada proyek ini namun pada tahap seleksi didapati lah Tiongkok sebagai pengambil alih proyek ini, hal yang menarik yang dapat ditemukan pada mega proyek ini adalah terkait pendanaan proyek ini sama sekali tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) karena penerapan sistem kerja sama investasi yang bersifat *business to business* di mana penerapan masa konsesi menjadi acuan pemerintah bahkan dikeluarkannya Peraturan Presiden nomor 107 tahun 2015 semakin memperjelas sistem investasi di proyek KCIC (Marantika *et al.* 2017).

Proyek KCIC juga merupakan perwujudan pemerintahan Jokowi terhadap peningkatan infrastruktur melalui pengaplikasian kebijakan Poros Maritim Dunia, Indonesia berdasarkan hasil kajian *World Economic Forum* pada tahun 2014, hanya lebih unggul dibanding Filipina dan masih jauh di bawah Singapura, India, Korea Selatan, serta beberapa negara di kawasan Asia. Melalui hal tersebut pada tahun 2016 disepakati bentuk MoU yang menyetujui proyek ini dengan menggandeng perusahaan *China Speed High Railway* dengan beberapa pembagian sistem afiliasi dengan beberapa perusahaan BUMN domestik dan swasta, dengan pembagian sistem afiliasi sebagai berikut:



Gambar 2. Sistem Afiliasi Proyek KCIC

Melalui sistem afiliasi di atas maka proyek KCIC cukup disokong dengan beberapa pihak termasuk dari perusahaan asal Tiongkok sekalipun, proyek ini juga merupakan bentuk implementasi dari AIIB dalam bentuk pendanaan atau bisa dikatakan sebagai bentuk investasi agar tercipta konektivitas yang cukup menjadi instrumen pembantu dalam pengaplikasian BRI oleh Tiongkok serta yang menjadikan proyek ini tetap berjalan yaitu bentuk kerja sama yang menerapkan *Business to Business* menjadikan Indonesia menyambut dengan baik bentuk investasi yang dilakukan (Sasmitasari *et al.* 2016). Sebelumnya, AIIB merupakan organisasi pendanaan internasional yang turut membantu memberikan dana infrastruktur ke sejumlah negara dan pendanaan dapat mendukung bentuk perdagangan dan juga investasi. AIIB dibentuk oleh Tiongkok sebagai instrumen pendukung untuk menjangkau negara-negara yang memiliki potensi untuk menyatukan arus perdagangan dan investasi sehingga BRI dapat terlaksana dengan mudah, karena BRI sendiri memiliki target untuk memusatkan Tiongkok sebagai pusat jalur sentra perdagangan internasional sehingga mendapat pengakuan sebagai negara terbesar di Asia dalam urusan perdagangan, bahkan PBB

menyatakan bahwa AIIB memiliki potensi kuat dalam menarik serta mengakomodir pembiayaan pembangunan berkelanjutan menjadi meningkat (Zulkarnain & Sutriyani 2021). Indonesia dalam hal ini karena telah ikut andil dalam perluasan BRI maka AIIB yang notabene dibentuk oleh Tiongkok pun memberikan beberapa suntikan dana kepada Indonesia sebagaimana proyek yang ada pada Tabel 1.

Tabel 1. Proyek Infrastruktur di Indonesia yang didanai oleh AIIB

No.	Proyek	Fokus Proyek
1.	Indonesia: National Slum Upgrading Project Approval Date June, 24 2016	Proyek akan memperbaiki akses terhadap infrastruktur dan layanan perkotaan di daerah kumuh yang ditargetkan di Indonesia. Ini akan mendukung program investasi infrastruktur kumuh perkotaan untuk 154 kota di bagian tengah dan timur Indonesia.
2.	Indonesia: Regional Infrastructure Development Fund Project Approval Date March, 22 2017	Proyek ini bertujuan untuk mendukung penataan dan operasionalisasi Dana Pembangunan Infrastruktur Daerah (RIDF) sebagai perantara keuangan, yang secara langsung diberikan kepada pemerintah daerah. Fokus pembangunan: transportasi perkotaan; penyediaan air dan sanitasi perkotaan; risiko drainase; banjir dan bahaya; pengelolaan limbah padat; dan up-grade kumuh dan perumahan terjangkau.
3.	Indonesia: Dam Operational Improvement and Safety Project Phase II Approval Date March, 22 2017	Untuk meningkatkan keamanan dan fungsionalitas dari 63 bendungan/waduk prioritas utama yang diprakarsai, mengembangkan dan mengarusutamakan pengaturan peraturan dan penganturan untuk pengelolaan bendungan dan pengelolaan waduk dan keselamatan yang lebih berkelanjutan dari perspektif teknis, lingkungan dan keuangan.

Tiongkok melalui AIIB juga mengarahkan agar kebijakan OBOR (*One Belt One Road*) yang merupakan inisiasi kebijakan yang sama dengan BRI pun memiliki strategi kebijakan yang cerdas yaitu menggunakan cadangan devisa negara untuk mendanai negara kecil atau berkembang sehingga dapat menarik para investor untuk menarik Tiongkok dalam proyek jangka panjang negara-negara berkembang, hal tersebut sejalan dengan kebijakan Indonesia yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan ikut terjun mensukseskan kebijakan Tiongkok dalam implementasi OBOR atau BRI. Namun hal yang harus diperhatikan bahwa kebijakan OBOR atau BRI memiliki hal yang

harus dicermati seperti contohnya pada negara Sri Lanka di mana ikut mensukseskan kebijakan ekonomi Tiongkok namun malah harus menanggung dampak negatif karena kondisi bunga sebesar 6,3 % dari total pinjaman \$190 USD (Rp 2,7 Triliun) mengalami kerugian akibat proyek bandara yang gagal dan berkat hal tersebut Sri Lanka mengalami krisis ekonomi, hal tersebut harus menjadi acuan bagi negara yang ingin mensukseskan kebijakan Tiongkok tapi tidak sempat mengambil *benefit* malah merugikan negara nya, disisi lain itu merupakan strategi Tiongkok dalam menjalankan kebijakannya ekonominya (Fania & Ardiyanti 2021).

Pada awal mula masa pandemic Covid-19, presiden Xi Jinping dan Presiden Jokowi sepakat untuk mendorong kemajuan baru dalam kemitraan strategis komprehensif Indonesia-Tiongkok. Kedua negara tersebut melakukan kerja sama untuk mengatasi tantangan pada saat pandemi yaitu melakukan pengadaan vaksin Covid-19. Pada sisi infrastruktur seperti yang sudah dibahas, kedua negara tersebut akan menyelaraskan strategi pembangunan seperti KCIC dan Koridor Ekonomi Komprehensif Regional. Kedua nya pun juga melakukan promosi mengenai kerja sama pembangunan dan memberikan kontribusi untuk pemulihan ekonomi regional (Nasution *et al.* 2023).

Keterbukaan Indonesia dalam menyambut investor asing khususnya dari Tiongkok juga menjadi alasan kuat Tiongkok dalam terus memperluas cakupan hubungan bilateral dengan Indonesia, bisa dikatakan berkegantungan karena membutuhkan sebuah pasar yang pasti agar bisa menguntungkan satu sama lain, Tiongkok dalam hal ini juga terus mendukung Indonesia dikarenakan posisi Indonesia sendiri sebagai negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi menuju ke level menengah secara per kapita dan menjadi mitra yang strategis untuk mengembangkan kerja sama secara global. Indonesia juga melakukan upaya-upaya

untuk memperlancar arus masuk investasi dan didukung melalui pembentukan paket kebijakan ekonomi. Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan ekonomi nomor dua untuk membuat pemerintah fokus untuk meningkatkan investasi asing dengan mempermudah izin berinvestasi. Kebijakan ekonomi nomor dua berisikan tentang kemudahan perizinan, pengurusan *tax allowance* dan *tax holiday* lebih cepat, tidak terdapat pungutan PPN untuk alat transportasi, insentif fasilitas di kawasan pusat logistik berikat, insentif pengurangan pajak bunga deposito dan perampangan izin sektor kehutanan (Andika *et al.* 2017).

BAB III

ANALISIS FAKTOR REGIONALISME TERHADAP PENGAMBILAN KEBIJAKAN INDONESIA TERHADAP TIONGKOK DALAM LINGKUP ACFTA

Dalam hubungan kerja sama ini Indonesia menjalin hubungan bilateral yang berkelanjutan terutama terhadap Tiongkok. Muncul sebuah hipotesa bahwa Indonesia mencoba melakukan perluasan dan peningkatan dikarenakan ada sebuah motif strategi kebijakan yang dilancarkan oleh Indonesia. ACFTA menjadi sebuah wadah khususnya bagi negara-negara di lingkup ASEAN yang memiliki satu tujuan dalam keikutsertaan di ACFTA yaitu memajukan sektor ekonomi, karena pada dasarnya seluruh keanggotaan di dalam ASEAN memiliki satu suara dalam mengambil seluruh kebijakan ekonomi. Seluruh negara ASEAN juga menjadi mitra utama Tiongkok dikarenakan faktor regionalisme yang secara tidak langsung mengikat negara-negara yang ada di ASEAN, namun pada hal ini berdasarkan data BPS pasar terbesar untuk dan dari Tiongkok merupakan Indonesia pada rentang 2015-2020. Faktor ekonomi merupakan elemen penting pada kemajuan sebuah negara namun ternyata ada beberapa alasan atau faktor kuat yang nyatanya dapat

dijadikan sebuah tolak ukur dalam pengambilan kebijakan luar negeri. Ada tujuh dan faktor yang menjadi acuan untuk menganalisa kebijakan Indonesia yang pada rentang 2015-2020 mengalami defisit neraca perdagangan namun malah meningkatkan bentuk kerja sama dengan Tiongkok. Analisis kali ini memuat faktor utama terkait regionalisme yang banyak berdampak kepada pengambilan keputusan Indonesia terhadap Tiongkok yang memiliki dampak dari berbagai sisi, hal tersebut telah dijabarkan oleh John Ravenhill pada buku *Global Political Economy* pada bagian ke-6 yang menjelaskan pengaruh kuat regionalisme terhadap pengambilan kebijakan suatu negara (Ravenhill, 506-516 2020).

Pertama adalah faktor kerja sama ekonomi yang telah berlangsung serta pembangunan kepercayaan antar mitra dagang. Faktor ini menjelaskan mengenai alasan Indonesia yang masuk kedalam sebuah kemitraan dagang serta loyalitas sebagai negara pelaku kerja sama sehingga menimbulkan stigma terkait kepercayaan mitra dagang yang akan membuat Indonesia dengan mudah menjalankan proses perdagangan.

Kedua adalah faktor regionalisme sebagai hadiah bagi Indonesia sebagai mitra dagang, di mana faktor ini merupakan manfaat dari loyalitas Indonesia sebagai mitra dalam lingkup regional yang diberikan Tiongkok dalam beberapa aspek seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan keamanan dsb.

Ketiga adalah faktor kerja sama regional yang telah terjalin membuka jalan bagi Indonesia dalam menciptakan agenda demi memperkokoh hubungan kedua negara dengan inovasi terbaru sehingga dapat dikatakan bahwa kedua negara memiliki kekuatan tersendiri dalam menjaga stabilitas negara.

Keempat adalah faktor regionalisme sebagai alat tawar menawar merupakan faktor keistimewaan dari sisi keuntungan kerja sama regional yang dilaksanakan

kedua negara sehingga bisa dijadikan bahan negosiasi demi mencapai keinginan dan kebutuhan negara masing-masing.

Kelima adalah regionalisme sebagai penguncian reformasi yang bertujuan untuk membangun rasa percaya satu sama lain serta membangun rasa percaya untuk badan yang menaungi kedua negara seperti WTO agar dipandang sebagai negara yang aktif dan sportif dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan.

Keenam adalah faktor timbal balik yang di mana pada hal ini Indonesia dan Tiongkok menginginkan sebuah timbal balik satu sama lain dari hasil kerja sama yang dilakukan kedua negara, sehingga faktor ini bisa mengacu kepada hubungan yang saling menguntungkan dengan sektor yang sekiranya dibutuhkan satu sama lain.

Ketujuh adalah faktor dari dampak implementasi perjanjian ACFTA yang menyebabkan kemudahan negosiasi untuk mencapai tujuan masing-masing serta implementasi ACFTA dalam mewadahi kedua negara dalam menjalankan proses dagang yang telah berlangsung selama ini.

3.1 Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Kepercayaan

Faktor terkait keterikatan hubungan perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok merupakan bentuk kerja sama berkelanjutan yang terjalin cukup lama, melalui hal tersebut maka kerja sama kedua negara dapat dikatakan sebagai aktivitas yang terbilang sangat aktif. Namun harus disadari bahwa dalam hubungan internasional sebelumnya tidak ada bentuk tradisi kemitraan, kerja sama di bidang ekonomi dapat menjadi proses dalam membangun kepercayaan antar negara. Kerja sama yang telah terjadi saat ini merupakan bentuk penyempurnaan dari bentuk kerja sama masa lampau yang dari tahun ke tahun mengalami perbaikan sistem sehingga dalam hal ini terciptalah bentuk naungan untuk kedua negara dalam menjalankan

proses dagang yaitu ACFTA. Perjanjian ini dibentuk agar dapat memperoleh akses dari dan menuju Tiongkok untuk negara ASEAN. Baik ASEAN maupun Tiongkok mendapatkan potensi yang besar dalam mendapatkan keuntungan ekonomi apabila keduanya menjaga hubungan atau interaksi yang baik dalam wujud kerja sama ekonomi dan non ekonomi. Namun, diawal pembentukan ACFTA fokus dari Tiongkok maupun ASEAN dalam pembangunan kepercayaan melalui pembentukan keamanan kedua belah pihak dengan membuat sembilan bentuk kerja sama keamanan maritime, salah satunya adalah *consultation on shipping security* yang di mana hal tersebut menjadi dasar dalam menjalankan kerja sama dibidang perdagangan (Hanggarini 2010). Karakteristik ini memiliki korelasi terhadap implementasi kemudahan akses serta mempertahankan sebuah kerja sama yang telah terjalin agar tetap menjadi mitra dagang berkelanjutan.

Dalam usaha mempertahankan pasar yang tengah berlangsung atau bahkan dapat dikatakan sebagai peningkatan pasar pasca kepemimpinan Presiden Jokowi maka Indonesia dihadapkan dengan kondisi defisit secara neraca perdagangan dengan Tiongkok, oleh karena hal tersebut Indonesia ternyata memiliki strategi dalam mensiasati hal tersebut dengan menaikkan nilai ekspor agar tercipta keseimbangan walaupun realitas yang terjadi secara neraca Indonesia belum bisa menunjukkan neraca surplus selama rentang 2015-2020. Namun ada hal yang menarik ketika Indonesia secara mengejutkan juga memiliki nilai ekspor yang meningkat dari tahun ke tahun pasca kepemimpinan Presiden Jokowi dan terbilang lebih signifikan secara neraca perdagangan Indonesia sudah dapat merasakan keuntungan dari mempertahankan pasar yang ada, nilai neraca yang diperoleh oleh Indonesia pada rentang 2015-2020 yang merupakan masa peningkatan serta perluasan pasar antara Indonesia dan Tiongkok sebagai berikut:

Tabel 2. Nilai Ekspor Indonesia terhadap Tiongkok (2015-2020).

No.	Year	Profit
1.	2015	\$15.046,1
2.	2016	\$16.790,8
3.	2017	\$23.083,1
4.	2018	\$27.132,2
5.	2019	\$27.961,9
6.	2020	\$31.781,8

Tabel diatas menunjukkan indikasi bahwa berkat motif keterikatan perjanjian dagang yang terjadi selama ini maka pasar yang dijaga dengan baik mengalami kenaikan secara neraca perdagangan (Badan Pusat Statistik 2022). Hal tersebut berdampak kepada *traffic* antara kedua negara menjadi semakin meningkat dikarenakan kepastian pasar yang sudah terikat dan menjadi sebuah aktivitas berkelanjutan, manfaat mulai dari penghapusan pajak bea masuk di lingkup ACFTA, penandatanganan beberapa MoU, pendanaan oleh AIIB, efek perluasan BRI, dan beberapa instrumen yang memfasilitasi bentuk kerja sama kedua negara juga menjadi faktor di mana motif ini dapat menjadi karakteristik yang tertanam dari Indonesia di mana industri dalam negeri diberikan ruang agar bisa tampil secara global.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penghasil sumber daya pangan dan juga sektor pertanian, di mana pasca peningkatan bentuk kerja sama selain harus mempertahankan bentuk kerja sama ini maka Indonesia dituntut dalam memperluas cakupan serta memberikan inovasi guna menciptakan pasar yang memiliki loyalitas tinggi karena disini baik Indonesia dan Tiongkok sama-sama masuk ke dalam negara dengan penduduk terbanyak dunia menduduki posisi 5 besar, hal tersebut juga akan merefleksikan bahwa permintaan pasar sangat tinggi,

secara aktual harusnya kedua negara membutuhkan stok bahan pangan dan *raw material* dengan jumlah yang cukup banyak (Ravenhill 2020).

3.2 Regionalisme Sebagai Hadiah Bagi Mitra Perdagangan

Poin kedua adalah keuntungan yang di mana ini diberikan untuk meningkatkan pengaruh dalam kebijakan luar negeri dan kepentingan strategis. Hal ini menjadi hasil dari konsistensi Indonesia dalam menjalankan hubungan dagang dengan Tiongkok dan pada akhirnya Indonesia bisa merasakan beberapa keuntungan dibalik Indonesia yang dasarnya merugi secara neraca perdagangan namun harus disadari bahwa hal seperti sistem ACFTA yang bersifat menghilangkan hambatan, memudahkan akses pasar juga dapat dikatakan sebagai sebuah hadiah akibat konsistensi Indonesia memilih mitra dagangnya, hal tersebut mengidentifikasikan dalam karakteristik Indonesia untuk melihat peluang dalam meningkatkan perkembangan teknologi dengan keterlibatan Indonesia di ACFTA, salah satunya adalah Tiongkok melalui perbaikan potensi akses pasar, fasilitas perdagangan yang sesuai dan aturan regulasi, serta kerja sama yang lebih tertata (Carporal 2017). Dalam konteks ASEAN, Indonesia menjadi mitra yang unggul dibanding negara ASEAN lainnya, hal tersebut dapat dilihat dari data Kementerian Perdagangan (2023) yang di mana tercantumkan grafik ekspor negara ASEAN ke Tiongkok bahwa Indonesia merupakan negara ASEAN dengan nilai ekspor tertinggi dengan nilai \$65,9 miliar USD.

Tiongkok memiliki kebijakan *Belt Road Initiative* (BRI) yang memiliki tujuan untuk memperkuat perekonomian Eurasia dalam berbagai aspek seperti infrastruktur, perdagangan dan investasi. Melalui BRI, Indonesia mendapatkan sumber investasi dan dibangunnya infrastruktur maritim yang berasal dari Tiongkok. Indonesia juga mendapat tawaran khusus dari Tiongkok untuk

memberikan donatur beberapa proyek infrastruktur di Indonesia. Dari hal tersebut, hubungan Indonesia-Tiongkok masih tetap terjaga bahkan pada saat pandemi Covid-19. Tiongkok tetap menjadi investor kedua terbesar di Indonesia setelah Singapura dengan nilai sebesar \$2,2 USD. Selain itu, Tiongkok juga masih menjadi mitra dagang terbesar di Indonesia dan total perdagangan antara kedua negara tersebut pada tahun 2020 mencapai \$36,5 USD (Fitriani 2020).

Upaya Tiongkok sendiri selama ini dalam menjalankan proses kerja sama antar negara sudah dinilai cukup baik serta memiliki mitra aktif yang tersebar di seluruh penjuru dunia, hal tersebut menjadikan Tiongkok tidak hanya ingin merambah antar negara melainkan juga ingin melakukan ekspansi ke suatu kawasan regional seperti ASEAN, bagi ASEAN sendiri Tiongkok merupakan mitra dagang utama. Pasca penerapan ACFTA, Indonesia merupakan pasar terbesar di ASEAN yang melakukan kegiatan dagang dengan Tiongkok. Sehingga, Tiongkok merupakan salah satu mitra dagang penting bagi Indonesia, maupun sebaliknya. Ketersediaan sumber daya alam khususnya untuk Indonesia menjadikan Tiongkok juga tidak luput memberikan manfaat bagi Indonesia yang di mana dalam hal ini bisa disebut sebagai hadiah sebagai mitra dagang, selain itu selama masa kepemimpinan Presiden Jokowi Tiongkok merupakan investor terbesar bagi Indonesia yang dapat dilihat dari gencarnya Tiongkok dalam melakukan pendanaan proyek infrastruktur berskala besar di Indonesia yang merupakan bagian dari program BRI merupakan bentuk hadiah yang diberikan dikarenakan Indonesia telah berperan dalam mensukseskan hubungan dagang dengan Tiongkok.

3.3 Kerja Sama Ekonomi Regional dan Agenda Keamanan Baru

Poin ketiga adalah kerja sama ekonomi regional dan agenda keamanan baru yang di mana kerja sama regional merupakan kegiatan yang dapat membantu

mengatasi permasalahan-permasalahan yang dapat menjadi ancaman (Ravenhill 2020). Salah satu permasalahan yang terjadi pada Indonesia-Tiongkok adalah konflik LCS (Laut Cina Selatan). Namun sebelumnya terdapat beberapa negara yang mengalami perselisihan dalam konflik LCS yaitu, Vietnam, Brunei, Filipina, Malaysia, dan Indonesia yang di mana negara tersebut merupakan anggota dari ASEAN. Berdasarkan konflik tersebut negara ASEAN sendiri memiliki kewajiban untuk menyelesaikan sebuah konflik apabila hal tersebut menyangkut soal stabilitas regional mereka, untuk konflik yang terjadi pada dasarnya sama yaitu terkait pengakuan secara sepihak oleh Tiongkok atas wilayah teritorial negara-negara ASEAN. Pada konflik tersebut Indonesia mulai terseret pada tahun 2010 yaitu dengan Tiongkok mengakui bahwa Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau merupakan perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Tiongkok beralasan bahwa berhak untuk mengakui Kepulauan Natuna atas dasar argument *traditional fishing zone*. Hal tersebut membuat situasi Indonesia dan Tiongkok menjadi bersitegang pada tahun 2013 hingga 2016. Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia menyatakan bahwa tidak memiliki klaim sengketa di LCS dan pengakuan garis teritorial sepihak dengan Tiongkok, serta Indonesia melakukan pengamatan mengenai geopolitik dan geostrategi yang terjadi di LCS agar bisa membuat strategi dalam menghadapi eskalasi di kawasan tersebut. Namun, Indonesia akan mengambil posisi netral dalam eskalasi di LCS karena Indonesia dan Tiongkok merupakan mitra strategis dalam mewujudkan kepentingan nasional Indonesia. Sifat kenetralan tersebut dilakukan untuk menjagahubungan baik antar kedua mitra dalam bidang ekonomi (Sulistiyani *et al.* 2021).

Tiongkok merupakan salah satu mitra dagang penting bagi Indonesia, maupun sebaliknya. Namun, apabila Indonesia tidak menjadi mitra Tiongkok

dalam ACFTA, Indonesia akan mengalami defisit neraca ekspor-impor Indonesia-Tiongkok dan terjadi penurunan jumlah industri dalam negeri, terutama industri manufaktur (Agasya 2015). Alasan Tiongkok menjadi salah satu mitra dagang penting Indonesia, maupun sebaliknya adalah karena ketersediaannya sumberdaya alam, tenaga kerja yang murah dan jumlah populasi penduduk yang terbilang cukup banyak menjadikan Indonesia memiliki keunggulan tersendiri dalam kerja sama ekonomi dengan Tiongkok. Hal tersebut membuat meningkatnya ekonomi tiap tahunnya. Melihat perkembangan mengenai hubungan antar dua negara tersebut setelah terjadinya konflik, membuat kerja sama kedua negara tersebut akan semakin berkembang.

Pada tahun 2020, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yaitu Luhut Binsar Pandjaitan menemui Menteri Luar Negeri Tiongkok yaitu Wa Ying untuk membahas mengenai kerja sama yang akan dilakukan di tengah pandemi Covid-19 dan persetujuan yang tercipta dari pertemuan tersebut adalah Indonesia sebagai pusat distribusi vaksin Covid-19 dari Tiongkok di Kawasan Asia Tenggara. Kerja sama Indonesia dan Tiongkok mengenai hal tersebut akan menguntungkan kedua belah pihak karena di satu sisi, Tiongkok menjadikan Indonesia sebagai tempat uji coba vaksin Covid-19 karena Indonesia memiliki lebih dari 270 juta penduduk, serta melakukan pengamanan akses pasar ke Asia Tenggara dan berpotensi besar untuk mendapatkan keuntungan ekonomi sebagai distributor di wilayah ASEAN. Selain itu, kerja sama mengenai vaksin tersebut dikarenakan Tiongkok merupakan mitra dagang utama Indonesia yang memiliki banyak proyek, salah satunya adalah KCIC yang dianggap memiliki banyak keuntungan. Pada tahun yang sama yaitu tahun 2020, Tiongkok juga turut menjadi sumber impor terbesar Indonesia yang bernilai \$ 44,5 juta USD. Hubungan yang kian membaik

serta intensif antara kedua negara tersebut dapat memperkuat pengaruh Tiongkok terhadap Indonesia, salah satunya secara ekonomi (Susilowati *et al.* 2023).

3.4 Regionalisme sebagai Alat Tawar-Menawar

Dalam melaksanakan perdagangan luar negeri maka dapat dikatakan ada dinamika didalam sistem itu sendiri tak terkecuali faktor tawar menawar, tawar menawar disini memiliki makna bahwa regionalisme bisa dijadikan alasan oleh negara pelaku kegiatan seperti pada kasus Indonesia dan Tiongkok di mana posisi kerja sama regional diposisikan sebagai bentuk kerja sama yang lingkupnya masih dibawah perjanjian multilateral dan bentuk kerja sama lainnya, sehingga regionalisme bisa dijadikan sebagai instrumen promosi khususnya negara berkembang agar dapat meraih pasar diluar regional dengan bukti kerja sama regional yang telah terjadi, karena pada praktiknya perusahaan transnasional akan melirik sebuah kawasan seperti ASEAN, hal tersebut menjadi acuan bahwa suatu kawasan regional seperti ASEAN yang pasarnya sudah besar dengan berisikan negara berkembang yang memiliki tujuan dalam pertumbuhan ekonomi bisa dijadikan alasan dalam ASEAN sebagai sebuah kawasan dengan pasar aktif sehingga dapat dikatakan bahwa ASEAN merupakan kawasan dengan daya tawar konsumen dan produsen yang baik dalam implementasi perdagangan luar negeri.

Faktor Integrasi juga cukup penting mengingat promosi kepada aktor eksternal jika bentuk kegiatan kedua negara yang dikatakan sebuah mitra ini menyatukan satu suara untuk meraih pasar yang lebih besar nantinya akan satu suara terkait proses tawar menawar. Salah satu kekuatan Indonesia dalam melakukan kegiatan perdagangan internasional adalah dengan ketersediaan sumberdaya alam yang melimpah. Sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Tiongkok bukan merupakan mitra dagang utama bagi Indonesia. Namun,

sejak masa pemerintahan Joko Widodo yang dimulai pada pertengahan 2014, Tiongkok menjadi mitra dagang utama Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya proses tawar menawar yang dilakukan oleh Indonesia. Salah satunya yaitu pada saat adanya pameran Tiongkok-ASEAN Expo 2015 yaitu melakukan tawar menawar mengenai komoditi sarang burung walet untuk dilakukannya ekspor kembali karena Indonesia merupakan negara yang menyediakan bahan baku untuk pembuatan sarang burung walet. Dari sisi Indonesia, Indonesia melakukan perdagangan untuk mendapatkan keuntungan serta perluasan pasar. Namun dari sisi Tiongkok, Tiongkok membutuhkan sarang burung walet sebagai salah satu makanan fungsional untuk kesehatan. Namun di Tiongkok sangat sulit untuk melakukan produksi sarang burung walet. Proses tawar menawar yang dilakukan Indonesia adalah Indonesia melakukan negosiasi yang mengarah pada keuntungan terbaik bagi pihak Tiongkok karena produk yang ditawarkan memiliki kualitas yang tinggi. Sehingga, mengenai proses tawar menawar tersebut, tentunya Indonesia dan Tiongkok saling memperoleh keuntungan yang besar karena sarang burung walet merupakan produk yang banyak diminati oleh masyarakat dan memiliki nilai jual yang tinggi. Sehingga terjadinya proses tawar menawar sampai pengesahan untuk dilakukannya kerja sama perdagangan sarang burung walet (Lestari 2022).

3.5 Regionalisme Sebagai Mekanisme Penguncian Reformasi

Poin kelima merupakan regionalisme sebagai mekanisme penguncian reformasi yang di mana menjelaskan bahwa kerja sama dalam lingkup regional akan menghasilkan kepercayaan kepada suatu mitra karena regionalisme lebih patuh dan terstruktur dalam implementasi kerja sama, serta efektif dalam meningkatkan kredibilitas. Regionalisme juga menjadi karakteristik suatu wilayah dalam persamaan pengambilan keputusan, baik ASEAN dan Tiongkok dalam

membuat kesepakatan untuk membentuk suatu kawasan perdagangan dalam meningkatkan perekonomian. Melalui hal tersebut, regionalisme lebih mudah dalam proyeksi masa depan untuk meraih reformasi masa depan. Dengan pentingnya peran Tiongkok dalam perekonomian global, khususnya di Asia, kemudian ASEAN merasa harus merangkul Tiongkok untuk menjadikannya mitra strategis dalam kerja sama ekonomi. Perjanjian ACFTA merupakan bentuk implementasi untuk meningkatkan kualitas kerja sama perdagangan guna meningkatkan perekonomian suatu negara. Dari sisi pemerintahan Indonesia, buruknya kualitas infrastruktur, tingginya suku bunga kredit investasi dan modal kerja, dan lain-lain merupakan bukti kegagalan pemerintah dalam menciptakan prasyarat dasar dan hal tersebut memacu pemerintah untuk meraih peluang positif dalam pemberlakuannya kerja sama ACFTA (Adam & Negara 2010).

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yaitu sejak dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2014, hingga saat ini Indonesia sudah memiliki 36 MoU dengan Tiongkok dan salah satu kesepakatan kedua negara tersebut yaitu dalam bidang perekonomian. Dengan disepakatinya 36 MoU Indonesia-Tiongkok dalam waktu yang cukup singkat menunjukkan bahwa Indonesia dan Tiongkok ingin menjalin hubungan yang lebih dekat lagi. Salah satu faktor mendekatnya Indonesia terhadap Tiongkok adalah pada masa pemerintahan Joko Widodo, Indonesia membutuhkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur tahun 2015-2020 sebesar Rp. 4.700 triliun (Bappenas 2015) dan Pemerintah Indonesia tidak dapat membiayai keseluruhan pembangunan tersebut, sehingga Indonesia membutuhkan Tiongkok untuk melakukan investasi. Tiongkok dengan program BRI akan memberikan dana pembangunan infrastruktur dan untuk membangun jalur OBOR dan BRI, Tiongkok membutuhkan dukungan negara Asian Tiger, salah satunya

yaitu Indonesia yang dapat membantu terbentuknya strategi *One Belt and One Road Initiative* (Andika & Aisyah 2017). Sehingga pada poin penguncian reformasi, ACFTA memiliki potensi untuk memberikan dampak positif yang menguntungkan bagi Indonesia terhadap perekonomian berkelanjutan.

3.6 Regionalisme Untuk Memenuhi Tuntutan Timbal Balik

Bentuk hubungan dagang ASEAN dan Tiongkok dipercaya sudah masuk kedalam fase saling percaya dan saling ketergantungan satu sama lain dikarenakan ada hal yang ingin dicapai dari bentuk kerja sama kedua pihak ini, ASEAN sebagai suatu kawasan regional tentu berharap akan sebuah kemajuan dan dampak positif dari implementasi ACFTA, ASEAN dengan menghilangkan hambatan dagang yang di mana sebelumnya pasar dagangnya terbelah monoton karena hambatan dagang dengan pihak luar masih sangat tinggi. Melalui ACFTA ASEAN mengharapkan pasar akan mengalami peningkatan khususnya industri dalam negeri dapat meningkat akibat dari implementasi ACFTA. Disisi lain Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki ambisi kuat untuk meraih nilai surplus neraca perdagangan, dibalik hal tersebut tentu ada motif tersendiri atau strategi yang diinginkan oleh Indonesia seperti peningkatan infrastruktur, peningkatan keamanan nasional, dan lain-lain. Hal tersebut tentu menjadi acuan pemerintah Indonesia dalam pengambilan kebijakannya, terkait keuntungan yang ingin diraih tentu tidak bisa lepas dari faktor timbal balik hubungan kedua negara di mana timbal balik disini tentu ingin menciptakan hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme.

Dalam Implementasi kerja sama kedua negara, Indonesia sebagai negara yang dalam hal ini mengalami defisit neraca perdagangan menginginkan sebuah timbal balik yang berdampak besar tentunya kepada pertumbuhan negara, oleh sebab itu lingkup regional dipercaya dapat mempermudah *feedback* yang diberikan

Tiongkok kepada Indonesia. Pada hal ini Indonesia sebagai contoh menginginkan peningkatan pada sektor infrastruktur transportasi yang pada hal ini Tiongkok siap menjadi garda terdepan dalam pemberian pengetahuan serta suntikan dana dalam mensukseskan keinginan Indonesia dalam peningkatan infrastruktur transportasi, yang di mana pada hal ini mega proyek KCIC (Kereta Cepat Indonesia Cina) yang merupakan proyek kolaborasi kedua pemerintahan menjadi ajang untuk bentuk implementasi bentuk timbal balik kedua negara, dari sisi Indonesia mendapat percepatan pembangunan proyek KCIC dan dari sisi Tiongkok mendapat validasi sebagai negara penyokong IPTEK serta dipandang positif sebagai mitra dagang yang membantu di lingkup regional.

3.7 Kemudahan Negosiasi dan Implementasi Perjanjian ACFTA

Indonesia dan Tiongkok merupakan mitra strategis yang telah melaksanakan kegiatan dagang cukup lama, hal tersebut mengalami banyak transformasi ketika masa kepemimpinan Presiden Jokowi dan Xin Jinping pada awal 2014, mengenai perdagangan maka akan banyak ditemui hambatan yang pada dasarnya akan menemui faktor negosiasi, hambatan terkait negosiasi yang terjadi menjadi mudah karena komitmen kedua negara yang tentunya memiliki beberapa perjanjian/MoU yang membuat bentuk negosiasi menjadi dua arah dengan cepat, seperti pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Indonesia dan Tiongkok untuk pencegahan pajak berganda juga merupakan bentuk MoU yang terbilang mendapat kemudahan negosiasi karena hanya melibatkan Pemerintahan kedua negara walaupun strateginya untuk menghilangkan hambatan dalam ACFTA. Hubungan kedua negara dapat dikatakan merupakan hubungan yang memiliki atap untuk menaungi kedua negara sehingga dalam hal ini ACFTA menjadi instrumen yang memfasilitasi kedua negara dalam menjalankan proses

dagang, ACFTA juga menjadi acuan Indonesia dalam melakukan kegiatan dagang karena ada badan yang setidaknya menaungi dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan Indonesia. ACFTA menjadi atap untuk kegiatan perdagangan regional kedua negara juga sebagai elemen yang membuat Indonesia mau melakukan beberapa kebijakan, sehingga kemudahan dalam proses dagang yang di mana melibatkan proses negosiasi akan mudah didapatkan dikarenakan ACFTA juga mengatur arus keluar masuk perdagangan kedua negara.

Terkait implementasi bentuk perjanjian ACFTA sebelum penerapan perjanjian ini kedua negara sudah melakukan hubungan kerja sama ekonomi yang terbilang cukup lama namun banyak ditemui hambatan dari sisi tarif dan non tarif, melalui hal tersebut penerapan ACFTA dilaksanakan guna mengantisipasi hal yang berkaitan dengan hambatan tersebut, sebelum penerapan seringkali kondisi mengenai negosiasi perihal aspek-aspek pelengkap perdagangan mengalami kesulitan dan terkesan bagi Indonesia kurang bisa memaksimalkan neraca perdagangan setiap tahunnya, ACFTA hadir untuk memaksimalkan peluang Indonesia dan negara di ASEAN untuk meminimalisir defisit neraca perdagangan, pasca penerapan ACFTA ternyata Indonesia memasuki fase peningkatan pada nilai impor khususnya di sektor tekstil di mana harga jual yang ditetapkan lebih murah dibanding harga tekstil domestik. Hal tersebut juga mengalami peningkatan kepada kenaikan nilai ekspor Indonesia khususnya pada barang mentah karena kekayaan alam Indonesia yang lebih mendominasi pasar (Sulthon 2014).

Melalui beberapa perubahan yang cukup signifikan membuktikan bahwa implementasi perjanjian ACFTA memiliki dampak positif dan negatif, dari sisi positif Indonesia bisa bersaing bebas dengan mudah untuk menjangkau pasar Tiongkok, untuk sisi negatif Indonesia lebih sering produk dalam negerinya kalah

oleh produk Tiongkok diakibatkan harga dasar maupun kualitas yang diberikan kalah menarik dengan Tiongkok, dengan dua sudut pandang positif dan negatif dapat dikatakan bahwa implementasi ACFTA sudah berjalan sebagaimana halnya sebuah perjanjian mengikat dua pihak agar sesuai dengan norma yang berlaku.

Faktor kemudahan negosiasi ketika sebuah perjanjian berjalan pada porosnya menjadikan variabel ini cukup menjadi alasan Indonesia tetap mempertahankan aktivitas dagangnya walaupun dalam kondisi defisit diakibatkan mudahnya akses dalam melakukan negosiasi dengan Tiongkok, walaupun nilai neraca perdagangan belum bisa mencapai kata seimbang namun Indonesia juga bebas dalam melakukan kenaikan nilai ekspor dikemudian hari berkaca kepada kemudahan negosiasi yang didapat setelah penerapan ACFTA.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari skripsi yang berjudul “ASEAN CHINA FREE TRADE AREA & Politik Perdagangan Luar Negeri Indonesia 2015-2020” secara garis besar membahas bentuk kerja sama Indonesia dalam ACFTA dengan Tiongkok, secara umum Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan dengan Tiongkok. Namun hal yang menarik pada awal kepemimpinan Presiden Jokowi Indonesia malah banyak melakukan bentuk peningkatan kerja sama yang secara tidak langsung makin mengancam nilai neraca perdagangan

Indonesia. Dengan banyaknya peningkatan pada kerja sama pada kedua negara maka dapat dikatakan pemerintah kedua negara sama-sama memiliki tujuan yang tentunya harus berdampak kepada negaranya. Disisi lain korelasi bentuk penetapan kebijakan Indonesia memiliki kesamaan dengan faktor regionalisme yang dijabarkan oleh John Ravenhill di dalam bukunya, melalui regionalisme ternyata Indonesia juga mencari celah dalam meningkatkan bentuk eksistensi dan manfaat bagi kepentingan nasional sehingga Indonesia sampai sekarang masih bermitra secara aktif khususnya dengan Tiongkok. Aplikasi dari teori John Ravenhill memberi alasan kuat terkait tetap bertahannya aktivitas dagang Indonesia dengan Tiongkok dalam skema ACFTA dan berikut penjabaran terkait aplikasi dari teori John Ravenhill yang dilakukan dalam bentuk kerja sama kedua negara.

Tabel 3. Kesimpulan Analisis Variabel

No.	Variabel	Aplikasi
1.	Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Kepercayaan	Kedua negara menjadi mitra paling aktif dan memiliki pasar terbesar di ACFTA
2.	Regionalisme Sebagai Hadiah Bagi Mitra Perdagangan	Prioritas di dalam ACFTA dan Indonesia mendapat suntikan dana AIB
3.	Kerja Sama Ekonomi Regional dan Agenda Keamanan Baru	Kepentingan nasional dalam menjaga pasar dan kepercayaan akibat netralitas Indonesia
4.	Regionalisme sebagai Alat Tawar-Menawar	Cakupan instrumen Regionalisme memberikan ruang lebih bagi proses tawar menawar kedua negara dibanding instrumen lainnya
5.	Regionalisme Sebagai Mekanisme Penguncian Reformasi	Peningkatan kerja sama berdasarkan proyeksi strategis dalam penguncian reformasi hubungan regional
6.	Regionalisme Untuk Memenuhi Tuntutan Timbal Balik	Proyek KCIC, Indonesia mendapat percepatan pembangunan dan Tiongkok mendapat validasi negara penyokong IPTEK di lingkup regional
7.	Kemudahan Negosiasi dan Implementasi Perjanjian ACFTA	ACFTA sebagai instrumen penghilang hambatan dan menjadi dampak yang positif bagi Indonesia

Tabel diatas merupakan bentuk dari pengaplikasian dari ketujuh variabel yang menjadi tolak ukur Indonesia dalam dinamika menjalankan hubungan dengan Tiongkok dalam skema ACFTA. Bentuk peningkatan kerja sama dalam hal ini mengacu kepada kebijakan, perdagangan, dan investasi menjadi tiga elemen utama dalam konteks peningkatan kerja sama kedua negara, dibalik peningkatan kerja

sama yang terjadi Indonesia sebagai subjek penelitian juga memiliki strategi dalam menyikapi kondisi ini dengan mengincar sektor lainnya sehingga akan mendapat manfaat dari sektor lainnya seperti yang telah dijabarkan oleh model teori John Ravenhill yang bisa menjawab urgensi Indonesia dalam tetap menjalankan proses perdagangan dengan Tiongkok.

Melalui faktor tersebut Indonesia juga mengambil dampak dari kemajuan nasional dengan peningkatan kerja sama maka akan berdampak kepada penggunaan SDM nasional dan diiringi perkembangan IPTEK akibat dari kemudahan akses yang telah terjadi akibat peningkatan kerja sama dengan Tiongkok. Namun harus dikatakan bahwa skema ACFTA tidak menjadi tolak ukur pasti dalam hubungan kedua negara, baik dari Indonesia sendiri bisa dilihat bahwa segala pergerakan dalam sektor perdagangan masih sangat mengandalkan ACFTA sebagai instrumen yang membantu menghilangkan hambatan dagang namun disisi investasi sendiri bisa dikatakan skema ACFTA tidak menjadi tolak ukur Indonesia dalam menjalankan proses kegiatan investasi, dengan hal tersebut maka skema ACFTA dalam hal ini bisa dijadikan opsi dalam pengambilan keputusan oleh Indonesia dan bisa diikutsertakan menjadi instrumen pembantu proses kebijakan atau bisa mengatasnamakan hubungan regional diluar ACFTA, dengan kata lain Indonesia berdiri sebagai negara mitra kawasan regional bukan sebagai anggota ACFTA yang mewakili ASEAN. Dalam hal ini Indonesia dengan melakukan beberapa pertimbangan dapat menjadikan tolak ukur kerja sama regional dengan Tiongkok sebagai sebuah manfaat dari sektor non ekonomi karena terlepas dari defisit neraca perdagangan yang dialami Indonesia dapat memperoleh beberapa manfaat lain seperti, mitra dagang aktif, agenda keamanan, penguncian reformasi, dan lain-lain sehingga dengan hal tersebut Indonesia memang mendapat keuntungan lebih

banyak dari sektor non-ekonomi. Melalui hal tersebut maka politik perdagangan Indonesia memang kembali kepada pertumbuhan nasional khususnya non ekonomi sehingga strategi yang diambil hingga saat ini merupakan strategi yang berfokus kepada pertumbuhan nasional non ekonomi dan untuk Tiongkok sendiri dapat memaksimalkan ekspansi negaranya dengan menyokong banyak aspek khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan rumusan kesimpulan diatas sebagai tindak lanjut hasil penelitian, maka penulis memberikan rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya, seperti skema ACFTA yang merupakan Instrumen penting bukan hanya untuk Indonesia namun untuk negara-negara yang tergabung di dalamnya juga menjadi sebuah masalah yang menarik untuk ditelaah secara seksama jika dijadikan subjek secara terperinci.

Selain itu isu terkait dampak perluasan dari BRI, untuk negara ASEAN juga menjadi sebuah isu yang memiliki korelasi kuat terhadap implementasi ACFTA karena walaupun berbeda atap perjanjian namun dampak yang ditimbulkan pasti memiliki korelasi terhadap setiap kebijakan yang dilancarkan oleh Tiongkok, lalu untuk tindak lanjutnya bisa menyoar kepada Tiongkok sebagai subjek penelitian dikarenakan strategi politiknya memiliki banyak implementasi yang mencakup banyak pihak di dalamnya dapat dijadikan sebuah penelitian kearah strategi Tiongkok dalam upaya melakukan peningkatan kerja sama terhadap negara yang memiliki ketergantungan dengan Tiongkok.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Latif, and Siwage Dharma Negara. 2017. "Asean-China Free Trade Agreement: Tantangan Dan Peluang Bagi Indonesia." *Masyarakat Indonesia* 36 (2): 1–24. <http://jmi.ipisk.lipi.go.id/index.php/jmiipisk/article/view/633>.
- Andika, Muhammad Tri, and Universitas Bakrie. 2017. "Analisis Politik Luar Negeri Indonesia-China Di Era Presiden Joko Widodo : Benturan Kepentingan Ekonomi Dan Kedaulatan" 2 (2).
- Calista, Priscilia, and Anugerah Karta Monika. 2022. "(Contagion Effects on China ' s Economy and Indonesia ' s through Trade Linkage) CONTAGION EFFECTS PEREKONOMIAN TIONGKOK DAN," 749–58.
- Candra, Clifford Septian, Jason Adrian, and Varren Christian Lim. 2021. "Indonesian Trade Deficit with China: Background and Grey Forecasting." *International Journal of Grey Systems* 1 (2): 33–46. <https://doi.org/10.52812/ijgs.15>.
- Capling, Ann. 2008. "Australia's Trade Policy Dilemmas." *Australian Journal of International Affairs* 62 (2): 229–44. <https://doi.org/10.1080/10357710802060576>.
- Cristina, Marta, Ni Putu, Rai Yuliantini, Dewa Gede, and Sudika Mangku. 2022. "Manakah Yang Lebih Besar Untung Atau Ruginya Indonesia Menjalinkan Kerjasama Dengan China." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10 (3): 277–84. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.
- Djermor, Janes. 2020. "TINJAUAN KEBIJAKAN RELAKSI PENYERAHAN SURAT KETERANGAN ASAL DIMASA PANDEMI COVID-19". Simposium Nasional Keuangan Negara 2 (1), 232-49.
- Elvierayani, Rivatul Ridho, Sukmawati Indah Dzikriah, Rachma Dwi Arifani, and Rifki Afriyandani. 2021. "Uji Beda Ekspor Dan Import Indonesia-China Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 5 (2): 1077–85. <https://doi.org/10.22437/jssh.v5i2.16485>.
- EIA. 2015. "South East Asia Energy Outlook. Directorate of Global Energy Economics". International Energy Agency.
- Fania, and Dwi Ardiyanti. 2019. "Dampak Kebijakan Reformasi Ekonomi Tiongkok Era XI Jinping Terhadap Perekonomian Global Di Tahun 2014-2019." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Kependidikan*, 2 (1): 101–8.
- Friedrich, List. 1966. "The National System of Political Economy". Kelley. New York.
- Herdiana. 2013. "Masalah Dan Strategi Mengatasi Defisit Neraca Perdagangan Indonesia." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53 (9): 1689–99.

- Jamilah, Jamilah, Bonar M. Sinaga, Mangara Tambunan, and Dedi Budiman Hakim. 2018. "Dampak Perlambatan Ekonomi China Dan Devaluasi Yuan Terhadap Kinerja Perdagangan Pertanian Indonesia." *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)* 20 (3): 325–45. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2016.v20.i3.61>.
- Kusumah, R. Wildan Pratama Indra. 2018. "Jalan Damai Menuju Keamanan Regional: Pendekatan Asean Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Laut China Selatan." *FACTUM: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah* 7 (2): 255–68. <https://doi.org/10.17509/factum.v7i2.15610>.
- Lestari, V. V. F. 2022. "STRATEGI PEMULIHAN EKONOMI INDONESIA AKIBAT PANDEMI COVID-19 MELALUI EKSPOR SARANG BURUNG WALET (SBW) KE CHINA DALAM PERSPEKTIF DEVELOPMENTAL STATE". Universitas Muhammadiyah Malang.
- Luerdi. 2014. "Melihat Tiongkok Dalam Pembentukan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) 1" 4 (1): 1–15.
- M, Syaiful, Henry Susanto, Asna Ariz Kawanti, and Marzius Insani. 2021. "Kebijakan Ekonomi Cina Pada Kebijakan Alibaba." *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 4 (2): 114–24. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v4i2.2675>.
- Marantika, Desi, Moch Bayu Erwinsyah, Jati Utomo Dwi Hatmoko, and Riqi Radian Khasani. 2017. "Analisis Risiko Investasi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung." *Jurnal Karya Teknik Sipil* 6 (1): 324–35. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkts/article/view/15909>.
- Mardhiyyah, Iasya. 2023. "Diplomasi Ekonomi Indonesia Terhadap Tiongkok Pada Masa Kabinet Kerja 2014-2019" 5 (1): 1–17. <https://doi.org/10.24198/padjirv5i1.39634>.
- Nurcahyo, Marsanto Adi, and Aditya Subur Purwana. 2020. "Dampak Penerapan Bea Masuk Anti-Dumping Atas Impor Produk Tinsplate." *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai* 4 (1): 145–65. <https://doi.org/10.31092/jpbpc.v4i1.746>.
- Putri, Sindy Yulia, and Dairatul Ma'arif. 2019. "Dinamika Hubungan Kerja Sama Indonesia- Cina Di Era Pemerintahan Joko Widodo." *Jurnal Kajian Lemhanas RI* 37: 15–24.
- Rana, Kishan S. 2007. "Economic diplomacy: the experience of developing countries. The New Economic Diplomacy: Decision-Making and Negotiations in International Economic Relations". Aldershot: Ashgate.
- Ravenhill, John. 2020. "Global Political Economy". 506-516.
- Salvatore, Dominick. 2014. "Ekonomi Internasional". Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, Yola Velinda, and Suhadak Suhadak. 2017. "Pengaruh Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) Terhadap Ekspor Komoditi Kelapa Sawit Dan Karet Alam Indonesia Ke China (Studi Pada Trade Map Periode Tahun 2006-2014)." *Jurnal Administrasi Bisnis SI Universitas Brawijaya* 44 (1): 54–61.
- Setiawan, Sigit. 2012. "ASEAN-China FTA: Dampaknya terhadap Ekspor Indonesia dan China". *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* 6 (2): 129-150.
- Setiawan, Sigit. 2014. "ASEAN-CHINA FTA: Dampaknya terhadap Ekspor Indonesia dan Tiongkok. Pusat Kebijakan Kerja sama Regional dan Bilateral". Badan Kebijakan Fiskal.

- Siwi, Arisa Permata. 2013. Bilateral Free Trade: Hubungan Perdagangan Indonesia-Tiongkok dalam Kerangka ACFTA. *Departemen Hubungan Int. Universitas Airlangga* 2 (3).
- Suharman, Yoga, and Sugiarto Pramono. 2021. "Strategi Kebangkitan Ekonomi Tiongkok Dan Pendekatan Long Cycle Transisi Kekuasaan Politik Dunia." *Spektrum* 18 (1): 1–20.
- Sumadji, P., Rosita and Yudha Pratama. 2006. "Kamus Ekonomi". Jakarta: Wacana Intelektual.
- Susilowati, Ida, Anisa Nuryanti Affandi, Cut Jihan Raihana, and Elsa Iqlima Az-Zahra. 2023. "Kerjasama Bilateral Indonesia-Tiongkok Dalam Diplomasi Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 10 (1): 125–40. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i1.31116>.
- Sutrisno. 2019. "Masalah dan Strategi Mengatasi Defisit Neraca Perdagangan Indonesia". *Jurnal Ekonomi* 21(3): 268-277.
- Wiko, Garuda., and Fatma. Kinanti, Muthia. 2021. "Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Kerangka Belt and Road Initiative." *Journal.Unnes.Ac.Id* 16 (2): 237–49. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>.
- Zulkarnain, and Nika Sutriyani. 2021. "Kepentingan Ekonomi Politik China Dalam Pembentukan Asian." *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 07 (4): 684–89.